

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PEMERINTAH SRI

LANKA TAHUN 2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

FARAH AZZAH AMANY

19323054

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PEMERINTAH SRI

LANKA TAHUN 2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

FARAH AZZAH AMANY

19323054

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Sri Lanka Tahun 2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the examiners]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta , 24 Agustus 2023



Farah Azzah Amany

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	14
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	14
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2	16
2.1. Budaya Politik di Sri Lanka	16
2.1.1 Dinasti Politik Sri Lanka.....	17
2.1.2 Otoritarianisme di Sri Lanka.....	21
2.1.3 Etnosentrisme yang kental	22
2.2 Sri Lanka pada Masa Kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa dan Kehancuran Rezim Rajapaksa	24
2.3 Bentuk Protes Masyarakat Sri Lanka terhadap Kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa	27
2.3 Bentuk Intervensi Pihak Eksternal	29
BAB 3	32
3.1. Faktor Penyebab Kekacauan yang Terjadi di Sri Lanka	32
3.1.1 Kesalahan dalam Praktik Pengelolaan Ekonomi dalam Jangka Panjang dan Utang Eksternal	32

3.1.2 Pemotongan Pajak dan Perluasan Uang Beredar	35
3.1.3 Pematokan Nilai Tukar	38
3.1.4 Sektor Pariwisata Sri Lanka Merosot.....	39
3.1.5 Politik	42
3.2 Perspektif <i>Failed States</i>.....	44
3.2.1 Institusi yang Lemah dan Gagal.....	45
3.2.2 Kegagalan Pemerintah memenuhi <i>Political Goods</i>	46
3.2.3 Kegagalan Legitimasi Pemerintahan.....	48
3.2.4 Kategori Sri Lanka Melalui <i>Failed States Theory</i>	49
BAB 4	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2 Saran dan Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indikator State Health

Gambar 2. Komposisi Utang Luar Negeri Sri Lanka (2004-2019)

Gambar 3. Tax Revenue (% of GDP) Sri Lanka

Gambar 4. Kedatangan Turis dan Penghasilan di Sri Lanka

Gambar 5. Pariwisata Internasional Sri Lanka (US\$ saat ini)

Gambar 6. Indikator State Health

DAFTAR SINGKATAN

GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
AS	: Amerika Serikat
LTTE	: <i>Liberation Tigers of Tamil Eelam</i>
UNP	: <i>United National Party</i>
SLFP	: <i>Sri Lanka Freedom Party</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ISB	: <i>International Sovereign Bonds</i>
BRI	: <i>Belt and Road Initiative</i>
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PAYE	: <i>Pay-As-You-Earn</i>
NBT	: <i>Nation Building Tax</i>
LKR	: Sri Lankan Rupee
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022 merupakan akumulasi dan ledakan dari kekacauan-kekacauan yang terjadi di dalam pemerintahan Sri Lanka selama beberapa tahun belakang. Sejak krisis ekonomi terburuk yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022, situasi negara Sri Lanka menjadi semakin tidak terkendali. Banyak hal yang terjadi setelahnya. Bahkan sampai pada titik dimana masyarakat Sri Lanka sudah tidak dapat mempercayai pemerintahnya sendiri. Karena hal ini, banyak pejabat pemerintahan yang memilih untuk mengundurkan diri dari kursinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kegagalan legitimasi yang dialami Sri Lanka pada tahun 2022. Sekaligus menganalisis kategori negara pada kegagalan legitimasi yang dialami Sri Lanka pada tahun 2022 berdasarkan teori *Failed States* yang dikemukakan oleh Robert I. Rotberg. Penelitian ini menemukan bahwa dalam dua dimensi dari indikator kegagalan negara, kondisi Sri Lanka termasuk ke dalam salah satunya, yang mana di dalamnya terdapat tiga aspek. Yakni institusi yang lemah, gagal menyediakan barang publik, dan kehilangan legitimasi di mata masyarakatnya.

Kata Kunci: Krisis, Sri Lanka, Legitimasi, Barang Publik

ABSTRACT

The economic crisis that occurred in Sri Lanka in 2022 is the accumulation and explosion of the chaos that has occurred within the Sri Lankan government in recent years. Since the worst economic crisis that occurred in Sri Lanka in 2022, the situation in Sri Lanka has become increasingly out of control. Many things happened after that. Even to the point where the people of Sri Lanka can no longer trust their own government. Because of this, many government officials chose to recuperate from their seats. This study aims to identify the factors that influence the legitimacy failure experienced by Sri Lanka in 2022. At the same time to analyze the category of countries in the legitimacy failure experienced by Sri Lanka in 2022 based on the theory of Failed States put forward by Robert I. Rotberg. This study found that in the two dimensions of state failure indicators, the condition of Sri Lanka is included in one of them, in which there are three aspects. Namely institutions that are weak, fail to provide public goods, and lose legitimacy in the eyes of society.

Keywords: Crisis, Sri Lanka, Legitimacy, Public Goods

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah negara di dunia saat ini jauh lebih bervariasi dan bertambah banyak daripada setengah abad yang lalu. Dengan tingkat populasi, kekayaan alam, produktivitas, ambisi, dan pencapaian yang lebih luas daripada sebelumnya. Pada tahun 1914, setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman dan Austro-Hungaria, ada lima puluh lima pemerintahan nasional yang diakui. Pada tahun 1919, ada lima puluh sembilan negara. Pada tahun 1950, jumlah itu telah mencapai enam puluh sembilan. Sepuluh tahun kemudian, setelah tercapainya kemerdekaan di sebagian besar Afrika, sembilan puluh negara. Setelah lebih banyak lagi wilayah Afrika, Asia, dan Oseanik merdeka, dan setelah runtuhnya Uni Soviet, jumlah negara melonjak menjadi 191; Kemerdekaan Timor Lorosa'e pada tahun 2002 menjadikan totalnya menjadi 192. Mengingat jumlah yang begitu eksplosif, kerapuhan yang melekat pada banyak rekrutan baru (lima belas dari lima puluh empat negara Afrika terkurung daratan), dan bahaya navigasi yang melekat pada ekonomi pasca-Perang Dingin. dan medan politik, kemungkinan kegagalan di antara sebagian dari total tetap ada (Rotberg 2003).

Negara dapat diklasifikasikan menggunakan berbagai jenis kesehatan negara yang sederhana. Pada kenyataannya, sebagian besar negara dengan sistem demokrasi liberal lebih stabil keadaannya karena dalam pelaksanaannya, demokrasi liberal lebih mengedepankan kebebasan berpendapat dan lebih memfasilitasi berbagai perbedaan sudut pandang dengan partainya masing-masing. Negara-

negara seperti Somalia dan Sierra Leone merupakan negara yang terbukti gagal dalam hampir segala hal karena iklim politik dan keadaan sosialnya. Namun juga masih ada negara bagian lain yang tidak mudah masuk ke dalam klasifikasi. Seperti Korea Utara dan Irak yang sistem pemerintahannya otoriter. Mereka mempunyai monopoli kekuatan yang sah di dalam perbatasan mereka, namun *public goods* dalam masyarakatnya jauh dari yang dipikirkan karena segala keterbatasannya dalam kebebasan berpendapatnya. Situasi negara-negara ini tidak terguncang oleh pemberontakan, namun di dalamnya terdapat tekanan karena disfungsi mereka yang semakin meningkat.

Sejumlah negara lain, termasuk Indonesia dan Filipina dapat dikatakan negara terfragmentasi, karena mereka menyampaikan *public goods* untuk masyarakatnya, namun di dalamnya banyak terjadi pemberontakan dan perselisihan antar wilayah dalam negara tersebut. Sama halnya juga dengan Sri Lanka ketika masa sebelum presiden Mahinda Rajapaksa memimpin. Sri Lanka memiliki sejarah pemberontakan yang membuat negara tersebut hidup dalam gejolak dan hampir saja menjadikan negara tersebut menjadi negara gagal. Sri Lanka ketika dalam pemberontakan berkepanjangan antara Sinhala dan Tamil, sudah tergolong menjadi *Fragmented State*, atau negara yang terfragmentasi. Dimana dalam hal tersebut, kondisi kontrol teritorial Sri Lanka sangat lemah, namun pemerintahnya masih bisa memberikan *public goods* dengan baik kepada masyarakatnya yang tidak terlibat (Rotberg 2003).

Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sri Lanka merupakan sebuah negara pulau di kawasan Asia Selatan yang terletak di pesisir tenggara India. Berdasarkan *Census of Population and Housing*

pada tahun 2021, jumlah penduduk Sri Lanka kini sebanyak 22.156.000 jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 1% dan total GDP negara sebesar US\$ 88.93 Miliar (World Bank, n.d.).

Sri Lanka merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki sektor ekonomi yang beragam. Seperti pertanian, perikanan, pertambangan, manufaktur, dan pariwisata. Adapun sektor yang menjadi tumpuan Sri Lanka dalam hal ekspor diantaranya adalah teh, tekstil, garmen, dan devisa dari sektor pariwisata. Pada sektor industri pariwisata, Sri Lanka memiliki berbagai macam pantai yang indah dan juga memiliki budaya seni yang beragam, seperti situs-situs sejarah yang dijadikan objek wisata baik masyarakat lokal maupun internasional (Major, n.d.).

Pada tahun 1997, Sri Lanka dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah, dan semakin menurun kondisinya sejak para pemimpin Sri Lanka menumpuk pinjaman luar negeri untuk kebutuhan pembangunan negara tanpa memikirkan resiko jangka panjang. Dan pada akhirnya meledak pada tahun 2022 ini menjadi krisis ekonomi terparah sejak masa kemerdekaannya.

Krisis terbesar Sri Lanka yang terjadi dalam sejarah negaranya yang terjadi pada tahun 2022 ini tentunya berimbas pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Masyarakat Sri Lanka kesulitan memenuhi kebutuhannya, hingga terjadilah berbagai kejadian yang merugikan masyarakat, seperti harga bahan pokok melonjak drastis, bahkan juga terjadi pemadaman listrik yang berkepanjangan di sejumlah wilayah (The Indian Express 2022).

Hal inilah yang pada akhirnya memicu gelombang amarah masyarakat Sri Lanka, hingga terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai sudut wilayah, yang pada akhirnya berujung anarkis (The Indian Express 2022).

Dalam hal ini, masyarakat Sri Lanka sudah tidak mempercayai pemerintahnya sendiri hingga legitimasi pemerintah Sri Lanka terguncang, yang mana dalam hal ini menyebabkan presidennya, Gotabaya Rajapaksa harus mengundurkan diri dari kursi pemerintahannya.

Karena kekacauan dan hilangnya legitimasi pemerintahnya, Sri Lanka termasuk ke dalam sebuah jurang *Failed States*. yang mana dalam dinamikanya, dalam mancanegara, terutama sejak Perang Dunia I dan Perang Dunia II serta Perang Dingin, akan terus terjadi perpecahan-perpecahan wilayah dan menimbulkan munculnya banyak negara baru. Terlebih di benua-benua yang belum banyak dijamah oleh negara-negara *super power*, seperti benua Afrika, Asia, ataupun Amerika Selatan. Negara-negara baru tersebut pasti berusaha untuk membangun negaranya sendiri. Namun, dalam upayanya tentu banyak terdapat kendala-kendala yang tentunya dapat menjerumuskan negara-negara tersebut menjadi negara gagal.

Dalam mancanegara, peristiwa yang terungkap dalam keadaan gagal atau *failed state* tidak hanya disebabkan oleh warga negaranya sendiri, namun juga pada negara tetangganya maupun pada ranah politik global. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah negara yang mengalami kegagalan atau mengalami sebuah proses kepada kegagalan meningkat (Rashid and Hamashuk 2012).

Kegagalan negara menunjukkan serangkaian karakteristik yang dapat diamati yang memenuhi syarat suatu negara untuk dianggap gagal atau gagal. Di

satu sisi, dalam literatur populer, kegagalan negara sering dikaitkan dengan negara-negara yang sering terlibat dalam pusaran konflik berkepanjangan. Baik itu dalam segi politik, perselisihan sipil, atau bobroknya sistem pemerintah pusat negara tersebut. Seperti Afghanistan, Sudan Selatan, atau Somalia.

Salah satunya juga yang sedang mengalami jurang krisis ini, yakni Sri Lanka. Yang setelah sekian lama membangun negaranya dengan segala jatuh bangunnya, kini Sri Lanka berada diambang kegagalan dan harus mengambil langkah yang tepat agar negaranya tetap dapat bertahan.

1.2 Rumusan Masalah

“Mengapa pemerintah Sri Lanka dapat mengalami kegagalan legitimasi pada tahun 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan legitimasi di Sri Lanka pada tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh kegagalan legitimasi yang dialami Sri Lanka pada tahun 2022.
3. Menganalisis kegagalan legitimasi yang dialami Sri Lanka pada tahun 2022 berdasarkan teori Robert I. Rotberg.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan memaparkan latar belakang bagaimana kegagalan legitimasi di Sri Lanka dapat terjadi pada tahun 2022 dan memaparkan hal apa saja yang dilakukan oleh Gotabaya Rajapaksa hingga membuat negara yang ia pimpin menjadi *chaos*. Rentang waktu yang diteliti dalam penelitian ini adalah tahun 2022 karena pada tahun ini juga terjadi krisis ekonomi Sri Lanka yang terbesar pasca kemerdekaannya yang menyebabkan demonstrasi terjadi di berbagai belahan kota di Sri Lanka yang berujung kepada ketidakstabilan politik. Dimulai ketika Kabinet Rajapaksa mengundurkan diri dari kursi pemerintahan karena kekacauan yang terjadi dan terjadi kekosongan pemerintahan di Sri Lanka. Maka dari itu, penulis akan menganalisis fenomena ini menggunakan kacamata *Failed States Theory* yang dikemukakan oleh Robert I. Rotberg dalam penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebagai landasan ilmiah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jurnal literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Jurnal pertama, penulis menggunakan jurnal dari Partners Universal International Research Journal (PUIRJ) berjudul "*Sri Lanka's Economic Crisis: A Brief Overview*" yang ditulis oleh A.S. Hovan George, A. Shaji George, dan T. Baskar. Jurnal ini berisi tinjauan singkat mengenai krisis ekonomi terburuk yang pernah terjadi di Sri Lanka beberapa tahun belakangan ini, yakni dimulai sejak tahun 2019-2022. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian Keyword Research Methodology, yakni merupakan metode pengumpulan konten terkait kata

kunci dari berbagai website menggunakan dasar-dasar metodologi penelitian kata kunci. Dalam penelitian yang digarap menggunakan metode penelitian *Keyword Research Methodology* ini dituliskan mengenai terdapat banyak penjelasan mengenai krisis yang terjadi di Sri Lanka ini. Disebutkan, selain dari masalah-masalah internal yang terjadi, terdapat juga unsur politik yang di luar kendali Sri Lanka, atau dikatakan sebagai takdir. Dan sebagian dari masyarakat Sri Lanka juga meyakini bahwa China turut bertanggung jawab atas masalah yang terjadi di Sri Lanka. Dalam penelitian ini, penulisnya menjabarkan mengenai faktor-faktor penyebab mengapa krisis ini terjadi. Mulai dari pengurangan pajak dan penciptaan uang, hutang yang tidak terkira jumlahnya, masalah krisis agrikultur, masalah pada bidang pariwisata saat wabah COVID-19 melanda, bahkan dikatakan juga terdapat efek dari perang Rusia-Ukraina. Selain itu, dalam jurnal ini juga menjabarkan mengenai apa saja dampak yang terjadi ketika krisis ekonomi ini berlangsung. Mulai dari pemerintahan yang goyang, ataupun masalah-masalah internal warganya yang tidak bisa lagi menerima haknya karena naiknya nilai mata uang (George, George, and Baskar 2022, 1-11).

Pada jurnal kedua, penulis akan menggunakan jurnal yang ditulis oleh W.M Hemachandra seorang asisten gubernur Central Bank of Sri Lanka yang berjudul *“Financial Crises and Impacts of Recent Financial Crises on Sri Lanka”*. Jurnal ini menjelaskan mengenai subjek krisis keuangan telah dibahas secara luas dalam literatur saat ini. Serangkaian penelitian telah dilakukan, dan substansial volume literatur tersedia di seluruh dunia tentang berbagai aspek krisis keuangan. Tulisan ini menjelaskan antara lain tentang situasi Sri Lanka sehubungan dengan krisis keuangan, khususnya krisis yang baru-baru ini dimulai di Amerika Serikat (AS).

Penelitian ini secara singkat menjelaskan berbagai pandangan tentang krisis keuangan yang telah berkembang di seluruh dunia. Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa kemungkinan penyebab krisis keuangan berdasarkan pengalaman yang dihadapi oleh berbagai negara saat mempresentasikan studi kasus yang menjelaskan krisis keuangan/ekonomi di Argentina, Chili, Meksiko, Asia Tenggara dan yang terbaru di Amerika Serikat. Penelitian ini juga menyoroti beberapa pelajaran yang bisa dipelajari dari krisis keuangan Amerika Serikat. Sehubungan dengan Sri Lanka, makalah ini menyajikan uraian dalam empat sub-topik, yaitu, penjelasan singkat tentang krisis keuangan sebelumnya di Sri Lanka, efek dari krisis AS baru-baru ini. tentang ekonomi Sri Lanka, langkah-langkah yang berkontribusi untuk meminimalkan dampak krisis AS terhadap ekonomi Sri Lanka dan bagaimana Ekonomi Sri Lanka bangkit kembali (Hemachandra 2011, 1-40).

Yang ketiga, penulis menggunakan sebuah buku yang diterbitkan oleh National Council of Churches in India (NCC Review) dalam bab artikel yang berjudul "*The Island State in Unrest: Emergent Economic and Political Crisis in Sri Lanka*" yang ditulis oleh Sebastian N. Artikel bab ini merupakan penelitian yang juga berbasis pada *Research Methodology*, dimana sang penulis mengumpulkan data untuk dijadikan dalam satu artikel bab. Dalam bab tersebut berisi mengenai kondisi ekonomi yang kini berubah menjadi ketidakstabilan politik di Sri Lanka yang kini sedang menjadi perhatian utama di negara-negara wilayah tersebut karena memiliki implikasi yang besar terhadap negara-negara di kawasan Asia Selatan. Dalam artikel bab ini dijelaskan mengenai sejarah kemerdekaan Sri Lanka dan situasi politik internal Sri Lanka saat Presiden Mahinda Rajapaksa berhasil melawan LTTE atau *Liberation Tigers of Tamil Eelam*. Setelah itu

dijelaskan bahwa Sri Lanka sempat pada kondisi yang stabil setelah berakhirnya perang sipil tersebut walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa perang saudara yang panjang itu tentunya juga merusak ekonomi negara. Dikatakan bahwa pada faktanya, Faktanya, struktur ekonomi Sri Lanka tidak bisa jauh dari tatanan kolonialnya. Pemerintah pascakolonial di Sri Lanka gagal membawa ekonomi Sri Lanka keluar dari perbudakan kolonial karena pemerintah tidak mengambil tindakan serius untuk mengaturnya kembali melalui diversifikasi kegiatan ekonomi atau industrialisasi. Dalam artikel bab ini juga banyak menjabarkan mengenai permasalahan internal Sri Lanka yang mendorong Sri Lanka sampai pada titik terburuknya (N 2022, 6-16).

Jurnal ke-empat, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mayang Kesya yang berjudul “Analisis Failed States terhadap Libya Pasca Kepemimpinan Muammar Qaddafi (2012-2016)” sebagai pedoman dan tinjauan penelitian penulis dalam meneliti sebuah topik menggunakan perspektif *Failed States*. Penelitian tersebut berisi mengenai bagaimana Teori *Failed States* memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan.

Yang terakhir, penulis menggunakan jurnal Takshashila Institution berjudul “*Sri Lanka’s Economic Crisis*” yang ditulis oleh Aarushi Kataria, Anupam Manur, dan Sarthak Pradhan. Jurnal ini berisi mengenai penjelasan krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka beserta faktor-faktor penyebabnya.

Penulis melihat dari penelitian-penelitian yang menjadi pedoman penulis dalam penelitian ini belum ada yang membahas mengenai kegagalan legitimasi pemerintah Sri Lanka pada Tahun 2022 yang spesifik membahas dari kacamata *Failed States Theory* oleh Robert I. Rotberg.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan perspektif *Failed States* yang dikemukakan oleh Robert I. Rotberg dalam bukunya yang berjudul “*Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicator*” guna memahami permasalahan yang terjadi di negara tersebut serta mempermudah penelitian ini untuk dianalisis.

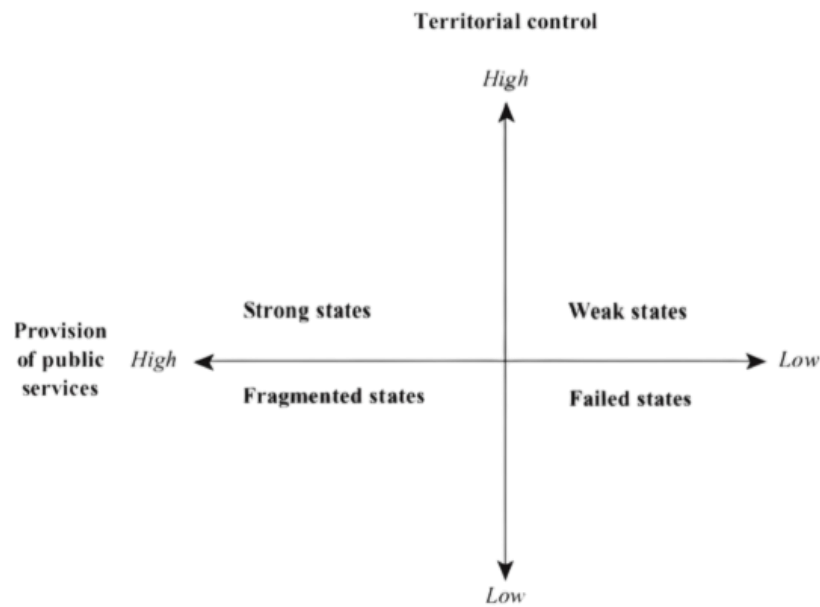
Teori ini berangkat ketika pada tahun 1998-2002 lalu, *The Harvard University Failed States Project* mencoba untuk menganalisis fenomena kegagalan dan keruntuhan negara-bangsa yang marak pasca perang dingin silam. Dalam pemikirannya tersebut, Robert I. Rotberg mengkaji kasus-kasus kontemporer mengenai keruntuhan dan kegagalan negara-bangsa. Rotberg mengatakan bahwa suatu negara-bangsa bisa gagal karena keadaan internal mereka terguncang dan terombang-ambing. Mereka terjebak dalam konflik dan kekerasan internal yang berkepanjangan.

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa negara-bangsa merupakan sebuah daerah teritorial yang terdapat rakyat di dalamnya sebagai penduduknya dan diperintah oleh sejumlah pejabat yang menuntut ketaatan dari warga negara pada peraturan undang-undang di dalam suatu wilayahnya melalui pengawasan monopolistik terhadap kekuasaan yang sah (Dr. Isharyanto 2016). Dan dalam menjalankan negara tersebut, terdapat fungsi dan tujuan untuk melakukan *nation building* atau pembangunan bangsanya guna mencapai negara yang ideal.

Fungsi utama sebuah negara berdiri menurut Robert I. Rotberg adalah; (1) untuk menyediakan keamanan politik yang baik; (2) untuk mencegah invasi dan infiltrasi lintas batas, serta hilangnya wilayah; (3) untuk menghilangkan ancaman domestik atau serangan terhadap tatanan nasional dan struktur nasional; (4) untuk mencegah kejahatan dan segala bentuk bahaya yang terkait dengan keamanan manusia di dalam negeri; serta (5) untuk memungkinkan warga negara menyelesaikan perselisihan mereka dengan negara ataupun sesama penduduk tanpa menggunakan senjata maupun bentuk paksaan fisik lainnya.

Ketika fungsi dari sebuah negara tersebut tidak terlaksana dan jauh dari kata ideal, upaya *nation building* negara tersebut dapat dikatakan negara menuju kegagalan yang pada akhirnya akan berujung pada *failing collapse* bahkan *failed*.

Adapun enam aspek penyebab gagalnya suatu negara menurut Robert I. Rotberg; (1) Telah kehilangan kendali atas wilayah perbatasan mereka; (2) Tidak dapat melindungi warganya dari kekerasan terorganisir; (3) Tidak dapat mencegah tumbuhnya kejahatan terorganisir; (4) Memiliki institusi yang lemah dan gagal; (5) Gagal menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial lainnya yang memadai; dan (6) Pemerintah kehilangan legitimasi di mata masyarakatnya.



Gambar 1. Indikator *State Health*

Kemudian dipersempit menjadi dua dimensi *state health* (kesehatan negara), yakni; (1) monopoli kekuatan yang sah atas wilayah negara; dan (2) penyediaan *public goods* untuk warga negara. Seperti yang dapat dilihat di Gambar 1 bahwa kekuatan negara-negara dikelompokkan menjadi :

1. *Strong States* (negara kuat)
2. *Fragmented States* (negara terfragmentasi)
3. *Weak States* (negara lemah)
4. *Failed States* (negara gagal) (Rotberg 2003).

Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa teori *Failed States* oleh Rotberg ini merupakan konsep yang paling sesuai untuk digunakan dalam menganalisis faktor penyebab kegagalan legitimasi pemerintah Sri Lanka pada tahun 2022 yang berlatar belakang pada krisis ekonomi yang menjalar pada kegagalan di banyak aspek lainnya. Pada kasus ini, penulis akan menganalisis, apakah Sri Lanka

termasuk ke dalam kelompok negara *Strong States*, *Fragmented States*, *Weak States*, ataupun *Failed States* berikut pula alasannya setelah semua hal yang terjadi di Sri Lanka.

1.7 Argumen Sementara

Krisis terburuk yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022 di bawah kepemimpinan Presiden Gotabaya Rajapaksa ini berakar dari krisis ekonomi dan merembet ke banyak aspek lainnya. Krisis ini membuat harga bahan-bahan kebutuhan pokok melonjak drastis, negara pun kekurangan devisa dan tidak mampu membayar impor bahan-bahan bakar hingga terjadilah pemadaman listrik berkepanjangan di sejumlah wilayah Sri Lanka yang berlangsung selama 13 jam pada awal tahun. Hal inilah yang memicu aksi unjuk rasa masyarakat sipil untuk mendesak Gotabaya mengundurkan diri karena dianggap tidak dapat bertanggung jawab. Dapat dilihat bahwa dalam situasi ini, pemerintah sudah tidak dapat menyampaikan *political goods* dalam upaya *nation building* nya. Dan dalam enam aspek gagalnya sebuah negara, Sri Lanka telah melakukan tiga dari enam aspek tersebut, yakni memiliki institusi yang lemah, gagal menyediakan layanan sosial, dan pada akhirnya Sri Lanka kehilangan legitimasinya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode yang berfokus pada proses dan pemaknaan hasilnya. Metode penelitian ini berbasis studi kepustakaan, dimana penulis menganalisis berdasarkan dari data-data yang

dikumpulkan dari berbagai studi literatur yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Metode ini relevan digunakan untuk menyoroti isu Krisis Legitimasi Sri Lanka yang terjadi pada tahun 2022 disertai dengan argumen yang relevan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah pemerintah Sri Lanka, yakni Gotabaya Rajapaksa sebagai aktor utama, sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab krisis legitimasi yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research*, yakni kegiatan yang dilakukan secara tersusun untuk mengumpulkan, menelaah, mengolah, dan menyimpulkan data melalui berbagai jenis literatur baik berupa buku, jurnal, artikel, berita, buku elektronik, dan berbagai laporan yang dirilis oleh pemerintah atau instansi tertentu dari negara yang bersangkutan untuk mencari jawaban atas masalah yang ingin dipecahkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian, hal pertama yang dilakukan penulis adalah melakukan riset literatur baik berupa buku, jurnal, artikel, ataupun berita. Yang kemudian penulis akan memilah data-data yang paling relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya, penulis akan mengelompokkan topik tersebut menjadi beberapa sub-bab dan mulai menyajikan data itu dengan narasi yang deskriptif. Terakhir, penulis akan menganalisis dan menarik kesimpulan dari narasi yang sudah disajikan tersebut.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menjelaskan mengenai dinamika yang terjadi dalam pemerintahan Sri Lanka dan memaparkan faktor-faktor penyebab kegagalan legitimasi yang terjadi di Sri Lanka. Setelah itu, juga akan dibahas mengenai intervensi dari pihak eksternal, seperti organisasi internasional ataupun negara sekitarnya untuk mengatasi peristiwa ini.

Bab ketiga akan berisi analisis mengenai faktor penyebab kegagalan pemerintahan yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022 dilihat dari perspektif Failed States guna mengetahui apakah Sri Lanka termasuk ke dalam negara gagal atau tidak.

Bab ke-empat akan berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB 2

DINAMIKA PEMERINTAHAN SRI LANKA

Bab ini akan membahas mengenai dinamika yang terjadi dalam pemerintahan Sri Lanka sejak masa kemerdekaannya, terutama akan dibahas mengenai budaya politik yang terjadi Sri Lanka yang berkaitan dengan penyebab dari lemahnya institusional di Sri Lanka sejak masa kemerdekaannya. Selain itu juga akan dibahas mengenai kepemimpinan keluarga Rajapaksa dan rangkaian peristiwa yang terjadi di era kepemimpinannya. Dan puncaknya akan mengangkat kasus yang terjadi beberapa tahun belakang ini yakni sampai pada masa krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka dan berujung kepada kegagalan legitimasi. Yang mana dalam sebuah negara, apabila masyarakat negara tersebut sudah tidak mempercayai pemerintahnya, disitulah akan terjadi masalah yang besar. Pada sub-bab pertama nantinya akan membahas mengenai budaya politik yang terjadi di Sri Lanka, yang mana dalam hal ini akan dibagi lagi menjadi 3, yakni dinasti politik, sistem politik Sri Lanka yang otoriter, dan permasalahan agama yang terjadi di Sri Lanka. Lalu pada sub-bab kedua, akan dijelaskan mengenai masa kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa dan awal mula kehancurannya. Dan pada sub-bab ketiga, akan membahas mengenai bentuk protes masyarakat Sri Lanka akan kebijakan Gotabaya. Serta pada sub-bab terakhir, akan dibahas mengenai bentuk intervensi dari negara sekitar dan sejumlah organisasi internasional.

2.1. Budaya Politik di Sri Lanka

Sri Lanka merupakan negara-bangsa yang merdeka pada tanggal 4 Februari 1948 dari kolonial bangsa Inggris. Sri Lanka menganut sistem pemerintahan

dibawah kepemimpinan *United National Party* (UNP) yang berusaha untuk mendirikan bentuk pemerintahan parlementer antara komunis yang anti komunis. UNP merupakan sebuah partai politik yang mendominasi politik Sri Lanka di awal kemerdekaannya. UNP memiliki peran dalam membawa standar kekuatan konservatif (Federal Research Division Library of Congress 1998).

Selain UNP, partai yang juga berkuasa di Sri Lanka di masa setelah kemerdekaan adalah *Sri Lanka Freedom Party* (SLFP) yang merupakan gerakan politik non-Marxis besar pertama yang menentang UNP. SLFP yang dipimpin oleh Solomon West Ridgeway Dias (S.W.R.D.) Bandaranaike.

Di luar dari partai-partai yang menguasai Sri Lanka, perpolitikan Sri Lanka yang cenderung memiliki institusi lemah siapapun pemimpinnya pun berhasil menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya para akademisi dan juga banyak media sejak tiga dekade yang lalu, tepatnya sejak awal terjadinya perang saudara Tamil dan Sinhala. Dalam Sub-bab ini akan dibahas mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi lemahnya institusi di Sri Lanka secara lebih lanjut.

2.1.1 Dinasti Politik Sri Lanka

Dalam pemerintahannya, sejak masa kemerdekaannya Sri Lanka kental akan dinasti politiknya. Dinasti politik bisa dibilang merupakan politik yang dipilih berdasarkan kekerabatan, yang mana dalam regenerasinya akan lebih mementingkan kandidat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan dan mengesampingkan prestasi. Hal ini biasanya sudah berakar dan turun temurun.

Selama beberapa dekade belakangan ini, di Sri Lanka tercatat hanya sedikit keluarga yang menguasai politik Sri Lanka. Yang mana hal ini bagai lingkaran setan

yang semakin lama jika dibiarkan, lembaga-lembaga hanya akan melayani kepentingan dari keluarga-keluarga itu sendiri, bukan lagi melayani masyarakat dan negara. Politik dinasti ini juga dianggap sebuah penghalang masuknya politisi baru yang lebih segar dan efektif.

Politik dinasti di Sri Lanka terjadi sejak kepemimpinan keluarga Senanayake dan Bandaranaike yang sempat mendominasi politik Sri Lanka. Pada saat itu, Bandaranaike menghasilkan Perdana Menteri perempuan pertama di dunia dan presiden eksekutif perempuan pertama di Sri Lanka. Klan Senanayake termasuk JR Jayawardene, presiden eksekutif pertama Sri Lanka. Presiden Eksekutif yang baru diangkat, Ranil Wickremesinghe, adalah keponakannya. Wickremesinghe diyakini akan menyerahkan kepemimpinan Partai Persatuan Nasional (UNP) yang berhaluan kanan-tengah kepada sepupunya Ruwan Wijewardena setelah ia pensiun. Bahkan juga orang luar yang telah mencapai puncak kekuasaan politik telah melahirkan garis keturunan dinasti. Sajith Premadasa, Pemimpin Oposisi dan calon presiden Samaggi Jana Balawegaya (SJB) pada tahun 2019, adalah putra dari Ranasinghe Premadasa, presiden eksekutif ketiga Sri Lanka (Attanayake 2022).

Dan yang terakhir, rezim yang baru hancur adalah rezim Rajapaksa. Rezim Rajapaksa ini berjalan selama hampir lima belas tahun lamanya, yakni dari tahun 2005 yang diawali dengan Mahinda Rajapaksa, sampai kehancurannya pada tahun 2022 dibawah kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa akibat dari krisis ekonomi dan kekacauan yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022. Mahinda Rajapaksa pertama kali mengawali karir politiknya di umur yang cukup muda, bahkan ia merupakan anggota termuda pada tahun 1970. Ia terpilih menjadi anggota parlemen

United People's Freedom Alliance dan mewakili daerah pemilihan Beliatta dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Sirimavo Bandaranaike. Lalu pada tahun 2005 lalu, Mahinda Rajapaksa menjabat sebagai kepala pemerintahan di Sri Lanka dapat dibilang cukup lama, ia menjabat dari tahun 2005 sampai 2015 ketika ia memenangkan pemilihan Presiden melawan mantan Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi, Ranil Wickremesinghe dengan jumlah suara 50,29%; sedangkan saingannya, Ranil Wickremesinghe, menerima 48,43% (Attanayake and Kapur 2018).

Kepemimpinan Mahinda Rajapaksa sangat berpengaruh bagi masyarakat Sri Lanka, karena pada masa kepemimpinannya, Mahinda Rajapaksa berhasil menepati janji kampanye politiknya untuk menjadikan Sri Lanka negara yang anti-terorisme dan menjamin keamanan nasional, dan kedaulatannya. Ia berhasil mengakhiri perang saudara yang terjadi hampir tiga dekade lamanya. Ia menghancurkan pemberontak Tamil yang dikenal sebagai *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) pada awal pemerintahannya di bulan Mei 2009. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Sinhala karena telah berhasil memerdekakan bangsanya dari pemberontak Tamil tersebut (Attanayake and Kapur 2018).

Mahinda sangat dipuja-puja, bahkan juga disandingkan dengan raja-raja Buddhis Sinhala di berbagai acara publik. Bahkan, seorang analis politik senior, Kusal Parera juga menulis buku mengenai Rajapaksa dengan judul "*Rajapaksa: The Sinhala Selfie*" yang didalamnya menceritakan peran Rajapaksa dalam politik negara dan bentuk pemikiran sang penulis terhadap sosok mantan presiden yang

sangat tangguh tersebut dan masih memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemerintah yang kini menjabat (Daily Mirror 2017).

Kekuasaan Rajapaksa berlanjut ketika pada tahun 2015, ketika Mahinda kehilangan kekuasaan pada tahun 2015 dari Presiden Maithripala Sirisena, yang mana juga merupakan dari keluarga elit, keluarga Rajapaksa mendapatkan kembali kursi kepresidenan oleh presiden Gotabaya Rajapaksa setelah tragedi teroris Islam megebom tiga gereja pada tahun 2019. Dalam tanggapan mereka terhadap pemboman tersebut, keluarga tersebut berhasil menggambarkan diri mereka sebagai pemimpin kuat yang mampu melakukan hal tersebut menjaga hukum dan ketertiban. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuasaan, mereka menunjuk beberapa anggota keluarga mereka untuk menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan tanpa memberikan pembenaran atas mandat mereka. Pada suatu waktu, lebih dari empat puluh anggota keluarga Rajapaksa menduduki posisi penting di pemerintahan, termasuk presiden, perdana menteri, dan sejumlah posisi menteri utama (Anwar 2022).

Dalam hal ini, terlihat bahwa keluarga Rajapaksa seperti mengubah negara menjadi sebuah perusahaan keluarga. Semua kabinetnya rata-rata merupakan kerabatnya. Permainan dalam dinasti politik ini tentunya termasuk ke dalam nepotisme. Dan nepotisme itu sendiri tentunya menyebabkan sumber daya manusia dalam perpolitikan Sri Lanka tidak tersaring dan menimbulkan banyak masalah baru lainnya dalam ketidakbecusan mengurus pemerintahan.

2.1.2 Otoritarianisme di Sri Lanka

Tindakan yang dilakukan oleh Mahinda Rajapaksa dalam menyalakan kebebasan sipil warga negara memicu otoritarianisme di Sri Lanka berkembang. Bahkan ketika ia dan kerabat-kerabat dekat dan pendukungnya mengambil alih kekuasaan, mereka memerintah secara ekstra-konstitusional dan di luar hukum. Mereka melakukan sebuah malpraktik, dan banyak yang menoleransi bahkan membenarkan hal tersebut. Hal tersebut terjadi selama perang melawan kelompok separatis *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE). Perang tersebut berakhir dengan cara yang brutal dan kontroversial pada bulan Mei 2009, dengan militer dituduh melakukan kejahatan perang pada kampanye terakhir. Sejak itu, pemerintah Sri Lanka dengan keras mengecam PBB dan negara-negara barat karena menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan tersebut. Selain itu, pemerintah juga sengaja merusak rekonsiliasi dengan minoritas Tamil, sekaligus memanipulasi iklim kemenangan Buddha Sinhala untuk lebih memperkuat kekuasaan eksekutif (Devotta 2013).

Selain itu juga, dalam reformasi politik, pemerintahan Rajapaksa menerapkan Amandemen ke-18, yang secara efektif memberikan wewenang kepada presiden untuk menunjuk para komisaris tersebut, sekaligus menghilangkan batasan masa jabatan presiden. Dan juga membatalkan Amandemen Konstitusi ke-17—yang membentuk Dewan Konstitusi dengan wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan komisaris independen yang mengawasi pemilu, pelayanan publik, polisi, hak asasi manusia, keuangan, penyusutan dan korupsi, serta peradilan.

Hal ini tentunya membuka peluang bagi dinasti Rajapaksa untuk memperpanjang dinasti politiknya, sebelum mengetahui bahwa pada akhirnya

dinasti Rajapaksa ini runtuh. Konstitusi Sri Lanka tahun 1978 memungkinkan adanya lembaga eksekutif yang kuat dengan sistem *checks and balances* yang minimal. Hal ini ditambah dengan perang saudara yang mengerikan memungkinkan presiden untuk memperluas kekuasaannya, dan Mahinda Rajapaksa telah melakukan hal tersebut hingga tingkat tertentu. Memang benar, para politisi, birokrat, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat ketakutan dan melemah di bawah pemerintahan Rajapaksa sehingga Sri Lanka saat ini lebih merupakan negara demokrasi semu – negara yang penuh dengan nepotisme, korupsi, sabotase lembaga-lembaga politik dan birokrasi, serta supremasi hukum yang lemah. , dan budaya impunitas di kalangan elit. Selain itu, militer Sri Lanka belum didemobilisasi sejak berakhirnya perang saudara, namun malah merambah ke proyek-proyek komersial sipil dengan cara yang meremehkan praktik bisnis yang adil (Devotta 2013).

2.1.3 Etnosentrisme yang kental

Sri Lanka merupakan negara yang multicultural, yang mana di dalamnya terdapat keberagaman budaya, agama, dan juga kelompok etnis. Hal ini membuat permasalahan etnis dan agama di Sri Lanka merupakan hal yang sangat sensitif hingga saat ini. Sri Lanka dijajah selama hampir 450 tahun, pertama oleh Portugis, kemudian oleh Belanda dan Inggris. Hal inilah yang kini membentuk susunan etno-religius di Sri Lanka.

Menurut sensus tahun 2012, rincian etnis di pulau ini adalah sebagai berikut: Sinhala 74,9%, Tamil Sri Lanka 11,2%, Tamil India 4,1%, Moor (Muslim) 9,3% dan lainnya 0,5%. Dalam hal agama, pulau ini memiliki 70,1% penganut Buddha,

12,6% Hindu, 7,6% Kristen (dengan 6,2% beragama Katolik Roma) dan 9,7% Muslim. Muslim berjumlah 7,5% pada tahun 1981, dan tingginya tingkat kesuburan komunitas agama tersebut telah menjadi perhatian beberapa nasionalis Budha Sinhala. Namun dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa, selama satu abad terakhir, jumlah komunitas mayoritas lah yang paling banyak mengalami peningkatan: pada sensus tahun 1911, penganut Sinhala dan Buddha masing-masing hanya berjumlah 66% dan 60% dibandingkan dengan kelompok etnis lain. menjadi 75% dan 70% pada tahun 2012 (Devotta 2017).

Sekitar tahun 1940-an, terjadi ketegangan antaretnis saat masyarakat Tamil menuntut keterwakilan antara kelompok minoritas (Tamil dan lainnya) dan Sinhala. Klaim ini berarti bahwa masyarakat Sinhala, yang jumlahnya hampir 70% dari populasi, hanya akan memiliki 50% perwakilan di badan legislatif. Baik orang Sinhala maupun Inggris tidak terlalu memikirkan permintaan tersebut. Sebaliknya, formula pembobotan diadopsi untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat Tamil, namun formula tersebut tetap memastikan bahwa warga Sinhala akan menjadi mayoritas di 75 dari 95 daerah pemilihan.⁴ Namun, meskipun ada perbedaan dalam hal keterwakilan, elit Sinhala dan Tamil bersatu untuk mendorong persatuan ketika terjadi konflik. membahas kemerdekaan, berkat kepercayaan yang diberikan kedua kelompok pada D.S. Senanayake, pemimpin UNP yang menjadi perdana menteri pertama Sri Lanka.

Perlakuan rasis terhadap masyarakat Tamil semakin memanas, bahkan masyarakat Tamil tidak diberikan kewarganegaraan terutama karena parapemimpin Budha Sinhala khawatir bahwa mereka mengancam keuntungan

demografis yang telah lama dinikmati oleh orang Sinhala di bagian utara (Devotta 2009).

Selain itu, gerakan yang menjadikan Sinhala sebagai satu-satunya bahasa resmi negara itu pada tahun 1956 semakin memperpanas keadaan (DeVotta 2004). Satu-satunya tuntutan Sinhala muncul ketika banyak orang Sinhala mulai menentang apa yang disebut gerakan swabasha (yang akan memberikan kesetaraan status bagi Sinhala dan Tamil) dan malah menuntut agar Sinhala dijadikan bahasa resmi negara tersebut. Posisi mereka diperjuangkan oleh politisi oportunistis dan tidak berprinsip seperti SWRD Bandaranaike, yang memanipulasi chauvinisme yang berkembang di komunitas mereka untuk merebut kekuasaan. Bandaranaike bercita-cita menjadi perdana menteri sebagai anggota UNP. Namun, ia meninggalkan partai untuk bergabung dengan oposisi dan membentuk SLFP setelah menyadari bahwa D S Senanayake sedang mempersiapkan putranya untuk posisi perdana menteri.

2.2 Sri Lanka pada Masa Kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa dan Kehancuran Rezim Rajapaksa

Pada tanggal 16 November 2019, Gotabaya Rajapaksa memenangkan pemilihan presiden dengan persaingan ketat melawan kandidat partai yang berkuasa, Sajith Premadasa. Menurut hasil akhir yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Sri Lanka, ia mengamankan kemenangan dengan 52,25 persen suara (Srinivasan 2019).

Dalam kampanyenya, keamanan adalah fokus utama yang ditekankan oleh Gotabaya. Bersamaan juga dengan kebangkitan ekonomi dengan melakukan pemotongan pajak. Pendukung Gotabaya rata-rata merupakan masyarakat yang

memuja keluarga Rajapaksa karena memenangkan perang 26 tahun melawan separatis Macan Tamil satu dekade lalu di bawah saudara laki-lakinya, mantan presiden Mahinda Rajapaksa (Hashim 2019).

Namun, ada pula kubu yang kontra terhadap Gotabaya, yakni mereka yang mengkritik kekuasaan keluarga atas politik Sri Lanka dan hubungan dekat dengan China, yang meminjamkan miliaran dolar ke Sri Lanka di bawah Mahinda Rajapaksa. Mereka juga menuduh Gotabaya Rajapaksa atas pelanggaran hak asasi manusia selama perang saudara, yang mana tuduhan itu dibantah oleh Gotabaya sendiri (Aneez and Sirilal 2019).

Dalam menjalankan pemerintahannya, Gotabaya benar menepati janji kampanyenya untuk melakukan pemotongan pajak. Gotabaya melakukan hal tersebut bertujuan untuk menstimulasi ekonomi. Namun siapa sangka bahwa hal ini justru menjerumuskan Sri Lanka ke dalam pusaran inflasi. Hingga akhirnya meledak juga pada tahun 2022 terjadi krisis terbesar dan terburuk sejak masa kemerdekaannya yakni di tahun 1948 yang sangat merugikan di banyak aspek di bawah kepemimpinan presiden Gotabaya Rajapaksa. Ditambah juga karena bertepatan dengan pandemi COVID-19, dan hal inilah yang ternyata menjadi awal kejatuhan tahta kepemimpinan presiden Gotabaya Rajapaksa.

Gotabaya Rajapaksa kesulitan mengendalikan situasi yang terjadi. Hingga pada kuartal Juni pada tahun 2022 lalu, tercatat negara tersebut mengalami penyusutan yang cukup dalam, yakni sebesar 8,4% (OCBC NISP 2023). Tercatat pada Indeks Demokrasi tahun 2018 pun dilaporkan bahwa sejak tahun 2018, Sri Lanka yang paling menurun drastis daripada negara lain kawasan ini. Skornya menurun tajam dari 6,48 pada 2017 menjadi 6,19. Didukung juga oleh semakin

buruknya fungsi pemerintah dan kebebasan sipil. Negara itu terjebak ke dalam krisis konstitusional ketika perdana menteri Ranil Wickremesinghe dipecat, dan digantikan dengan sekutunya, Mahinda Rajapaksa, mantan presiden Sri Lanka. Kekuasaan presiden yang melampaui batas ini telah mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Banyak terjadi krisis di berbagai belahan kota di Sri Lanka yang kemudian berkembang menjadi masalah nasional, keadaan menjadi sangat kacau.

Disebutkan juga bahwa salah satu yang menyebabkan krisis ekonomi ini terjadi adalah kesalahan pemerintah Sri Lanka dalam menyikapi perekonomian negara, pemerintah Sri Lanka berturut-turut dari tahun ke tahun menyikapi perekonomian negara dengan menciptakan dan mempertahankan defisit ganda yakni pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pemasukan, sedangkan defisit neraca tetap berjalan. Seperti yang dilakukan Mahinda Rajapaksa pada masa pemerintahannya, ia mengambil pinjaman dari China dengan jumlah yang sangat besar untuk membangun infrastruktur (Attanayake and Kapur 2018).

Dikatakan juga bahwa terdapat andil Presiden Gotabaya Rajapaksa hingga memasuki jurang krisis ini, karena pada saat pra penyebaran virus COVID-19, Gotabaya gencar melakukan penetapan kebijakan pemotongan pajak guna menstimulasi ekonomi untuk keuntungan politik pada saat masa-masa pemilu 2019. Hingga akhirnya meledak juga pada tahun 2022 terjadi krisis terbesar dan terburuk sejak masa kemerdekaannya yakni di tahun 1948 yang sangat merugikan di banyak aspek.

Krisis ini membuat harga bahan-bahan kebutuhan pokok melonjak drastis, dan berbagai cadangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan mulai menipis. Hal

ini juga berpengaruh pada kesehatan, penyakit menular meningkat karena menurunnya fasilitas kesehatan, kurangnya perawatan kesehatan yang meningkatkan morbiditas kardiovaskular, malnutrisi, bahkan berpengaruh pada kesehatan mental dan memperburuk kualitas hidup (Matthias and Jayasinghe 2022).

Bahkan pemerintahan dibawah kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa ini kekurangan devisa dan tidak mampu membayar impor bahan bahan bakar. Sehingga terjadilah pemadaman listrik berkepanjangan di sejumlah wilayah Sri Lanka yang berlangsung selama 13 jam pada awal tahun 2022 yakni pada 30 Maret lalu. Hal ini tentunya sangat berdampak pada mobilitas warga dan mengganggu berbagai aspek seperti kegiatan bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari (The Indian Express 2022).

2.3 Bentuk Protes Masyarakat Sri Lanka terhadap Kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa

Karena kejadian pemadaman listrik berkepanjangan ini, gelombang amarah masyarakat semakin berkecamuk hingga terjadilah demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk kekecewaan warga negara Sri Lanka di berbagai belahan kota sejak beberapa bulan terakhir, terhitung sejak akhir tahun 2021 sembari memblokade beberapa jalan utama di berbagai kota yang berakhir rusuh karena terjadi bentrok antara kepolisian setempat dengan para pengunjuk rasa yang menurut laporan para pengunjuk rasa, polisi setempat mulai menembakkan gas air mata, meriam air, dan memukuli pengunjuk rasa yang hadir. Bahkan penahanan terhadap sejumlah pengunjuk rasa. Selain itu, para pengunjuk rasa juga tidak tanggung-tanggung

menuntut Gubernur Ajith Cabraal di luar Bank Sentral Sri Lanka untuk dipecat (The Indian Express 2022).

Demonstrasi yang sangat kisruh itu pun akhirnya menjadi titik balik popularitas Presiden Gotabaya Rajapaksa yang semula dilirik oleh masyarakat pada saat pemilihan umum 2019 karena ia menjanjikan stabilitas dan pemerintahan yang kuat, menjadi dicemooh oleh masyarakat. Ia dianggap melakukan korupsi dan nepotisme yang menyebabkan situasi negara saat itu menjadi seperti itu. Apalagi setelah masyarakat Sri Lanka tersadar bahwa jajaran kabinet pemerintahannya terdiri dari saudara-saudara yang masih ada ikatan darah dengannya. Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa pun didesak oleh para pengunjuk rasa untuk mengundurkan diri (The Indian Express 2022).

Hal inilah yang memicu krisis ekonomi tersebut merembet ke banyak aspek, termasuk aspek politik. Puncaknya pada saat jajaran kabinet pemerintahan mulai banyak yang mengajukan pengunduran diri secara massal pada hari Selasa, 4 April 2022 yang lalu hingga sehari setelahnya. Tercatat 26 menteri memilih untuk mengundurkan diri secara serentak, kecuali Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa dan saudaranya, Presiden Gotabaya Rajapaksa. Tercatat bahwa para kabinet pemerintah tersebut mengundurkan diri dengan harapan yang dilakukan tersebut akan lebih membantu Presiden dan Perdana Menteri untuk kembali menstabilkan keadaan yang terjadi, baik di rakyat maupun pemerintah (BBC 2022).

Tidak sampai di situ, tidak kuasa mengatasi demonstrasi yang semakin merebak, pada tanggal 14 Juli 2022, presiden Gotabaya Rajapaksa memilih untuk melarikan diri ke Maldives dan menyerahkan pemerintahan kepada Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe. Dilanjut setelah dari Maldives, Gotabaya

melarikan diri ke Singapura pada tanggal 15 Juli 2022. Di saat itu pula, sesampainya di Singapura, Presiden Gotabaya Rajapaksa mengirimkan *email* pengunduran diri. Mendengar hal itu, para pengunjuk rasa yang berdemo di sekretariat presiden di Kolombo menyerukan kegembiraan dan menandainya dengan menyalakan petasan dan menari-nari di lokasi protes *Gota Go Gama*, yang sengaja dinamai dengan mengejek nama Gotabaya. Namun dengan mengundurkan dirinya Gotabaya, pemerintahan Sri Lanka kini sementara dipimpin oleh Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang kini merangkap jabatan dan hingga saat ini, badai krisis berkepanjangan di Sri Lanka ini seperti tidak memiliki ujung (Jayasinghe, Pal, and Lin 2022).

2.3 Bentuk Intervensi Pihak Eksternal

Dalam krisis ekonomi yang berujung pada krisis legitimasi di Sri Lanka ini tentunya tidak hanya Sri Lanka yang mengalami dampaknya. Namun juga negara-negara sekitarnya seperti India, dan juga sejumlah organisasi internasional seperti *International Monetary Fund* atau IMF.

Di dalam pusaran kekacauan yang terjadi di Sri Lanka, banyak masyarakat Sri Lanka yang berusaha melarikan diri ke negara tetangganya, yakni India. Sebelumnya, pelarian warga melintasi jalur pendek Sri Lanka dan India bukan hal yang baru. Saat terjadi perang saudara antara Sinhala dan Tamil sekitar awal 1980-an dulu, kota Dhanushkodi di negara bagian Tamil Nadu di India serta negara bagian selatan Karnataka dan Kerala menjadi tempat pelarian diri ribuan keluarga Tamil, karena hanya berjarak sekitar 27 kilometer dari pemukiman Talaimannar di

Sri Lanka. Ribuan keluarga Tamil tersebut melarikan diri untuk mencari perlindungan (Sen 2022).

Sama halnya dengan pusaran kekacauan yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022, warga negara Sri Lanka banyak juga yang memilih untuk melarikan diri mencari perlindungan dan kelayakan hidup di India.

India menegaskan ketersediaannya untuk memainkan peran “konstruktif” sebagai *Co-Chair of the Creditors Committee* bersama Jepang dan Paris dalam mendukung upaya Sri Lanka untuk pemulihan ekonominya (The Hindu 2023).

Per-bulan Mei 2023, tercatat sebanyak 17 negara telah memberikan pinjaman ke Sri Lanka dengan membentuk komite kreditur resmi yang diketuai oleh India, Jepang, dan Prancis.

India membantu memberikan pinjaman utama kepada Sri Lanka melalui penyediaan pembiayaan darurat. Pemerintah Tamil Nadu juga memberikan bantuan keuangan sebesar \$24,6 juta dalam upaya untuk mengawasi kemungkinan pergerakan lintas batas. Dana talangan oleh Dana Moneter Internasional dipandang sebagai cara lebih lanjut untuk mengurangi krisis. *Credit limit* bagian dari sekitar \$4 miliar bantuan darurat diberikan oleh India dan diperpanjang batas kredit \$1 miliar untuk Sri Lanka selama satu tahun (Al Jazeera 2023).

Selain itu, India juga merupakan negara pertama yang membantu dengan menyerahkan surat dukungannya untuk pembiayaan dan restrukturisasi utang Sri Lanka ke *International Monetary Fund* (IMF) (The Hindu 2023).

Sedangkan peran IMF disini sebagai organisasi pendanaan internasional, *International Monetary Fund* menyetujui untuk memberikan dana talangan kepada Sri Lanka sebesar \$3 miliar (£2,4 miliar). Hal ini tentunya dapat membantu Sri

Lanka untuk membuka hingga \$7 miliar lebih dari pemberi pinjaman lain seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank* (Jamkhandikar et al. 2023).

BAB 3

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN LEGITIMASI PEMERINTAH SRI LANKA TAHUN 2022

3.1. Faktor Penyebab Kekacauan yang Terjadi di Sri Lanka

3.1.1 Kesalahan dalam Praktik Pengelolaan Ekonomi dalam Jangka Panjang dan Utang Eksternal

Yang terjadi dalam kasus ini, Sri Lanka telah mengalami kesalahan dalam mengelola perekonomian dalam jangka yang panjang sejak masa pemerintahan Presiden sebelum-sebelumnya. Politisi dan pengusaha telah berpengaruh dalam kemunduran Sri Lanka selama bertahun-tahun secara berturut-turut. Bahkan mereka telah lama hidup di luar kemampuan mereka.

Pada tahun 1977, Sri Lanka membuka pintunya ke ekonomi terbuka yang membuat impornya terus meningkat, sedangkan eksportnya tetap pada industri terbatas yang sama. Yang mana hal ini tentunya menghalangi negara untuk menciptakan sumber pendapatan baru (silva, Jayathilake, and Anandhan 2022, 2). Pemerintah Sri Lanka juga melakukan strategi perputaran utang dalam menjaga negaranya agar tetap bertahan, yakni dengan cara memanfaatkan pinjaman baru dan juga memanfaatkan pendapatan pariwisata dan pengiriman uang internasional untuk membayar kebutuhan utangnya. Pemerintah Sri Lanka berulang kali menerima pinjaman dari China yang membuat negara itu jatuh ke dalam perangkap utang.(DeVotta 2022).

Sri Lanka merupakan negara yang sangat bergantung dengan impor untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Seperti makanan dan bahan bakar. Bahkan,

jumlah impor di Sri Lanka lebih banyak daripada jumlah eksportnya. Maka dari itu, Sri Lanka harus meminjam untuk membayar selisihnya.

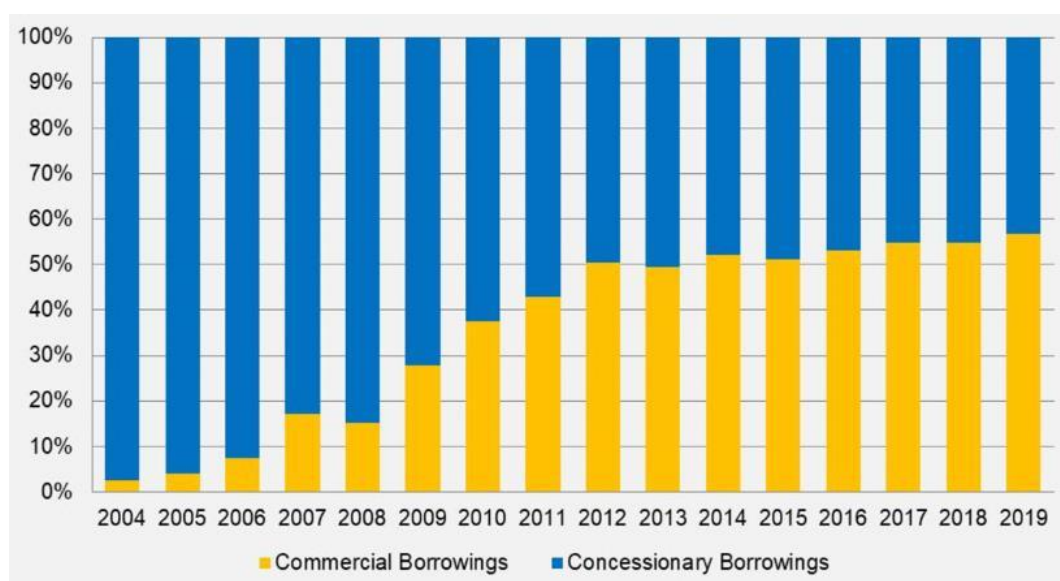
Saat ini, tercatat bahwa negara ini sedang berusaha untuk membayar impor bahan pokok tersebut. Tercatat, kewajiban utang luar negeri Sri Lanka per Maret 2022 melebihi \$7 miliar. Sedangkan cadangan devisa negara per Maret 2022 hanya \$1,6 miliar (Frontline 2022).

Per-12 April 2022, Sri Lanka mengumumkan bahwa mereka gagal membayar semua utang luar negerinya setelah cadangan devisanya habis. Negara dinyatakan bangkrut. Harga-harga dipasaran pun naik sangat tajam. Karena itu, Sri Lanka hanya bisa berharap kepada IMF agar dapat membantu menalangnya dan juga berharap agar menyelamatkannya dari situasi krisis yang kian memburuk.

Utang luar negeri yang membengkak ini sudah terjadi selama lebih dari satu dekade di Sri Lanka, disebabkan oleh kesalahan pemerintahnya dalam menyikapi keuangan negara. Hal ini berawal pada tahun 1997, ketika *World Bank* menyatakan bahwa Sri Lanka merupakan berpenghasilan menengah ke bawah, dari sebelumnya yang dikategorikan sebagai negara berpenghasilan rendah (Daily FT 2020). Selanjutnya, sekitar tahun 2000-an awal, pemerintah Sri Lanka dengan serakahnya berturut-turut banyak meminjam uang dari *International Sovereign Bonds* (ISB) melalui penerbitan obligasi pemerintah, yang secara serius berkontribusi terhadap prakarsa neraca pembayaran negara. Pinjaman ini dinilai tidak bersyarat, dengan suku bunga yang relatif tinggi dan jangka waktu pembayaran yang lebih singkat, karena tidak lagi bisa memanfaatkan dana konsesi baru dan perekonomian bergeser kepada sumber komersial (Frontline 2022).

Setelah itu, pada tahun 2007, negara tersebut menerbitkan *International Sovereign Bonds* (ISB) pertamanya senilai US\$500 juta, diikuti oleh putaran besar pinjaman dari pasar modal internasional dalam bentuk ISB. Dari tahun 2004 hingga 2019, pinjaman komersial negara masing-masing telah meningkat dari 2,5% menjadi 56 persen dari total pinjaman luar negeri. Hal inilah yang meningkatkan ketidakstabilan ekonomi makro.

Gambar 3. Komposisi Utang Luar Negeri Sri Lanka (2004 – 2019)



Sumber : *The Diplomat*, data dari Bank Sentral Sri Lanka

Seiring berjalannya waktu, utang Sri Lanka semakin membuktikan akibat terusan meminjam dana dari *International Sovereign Bonds* (ISB). Per April 2021, tercatat bahwa utang Sri Lanka sebesar 47% berasal dari ISB. Disusul oleh pemberi pinjaman terbesar kedua, yakni Bank Pembangunan Asia sebesar 13%, dan diikuti oleh China sebesar 10,8% untuk proyek infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Sebagian lagi dibawah Belt and Road Initiative (BRI), dan diikuti juga oleh Jepang sebesar 10,9% (Jayasinghe 2022).

Dan mulai pada tahun 2019, Sri Lanka kehabisan uang hingga menggunakan cadangan devisanya untuk membayar kewajiban utang. Namun sayangnya, kini jumlah hutangnya lebih besar daripada jumlah cadangan devisanya, hingga terjadilah krisis yang memprihatinkan.

3.1.2 Pemotongan Pajak dan Perluasan Uang Beredar

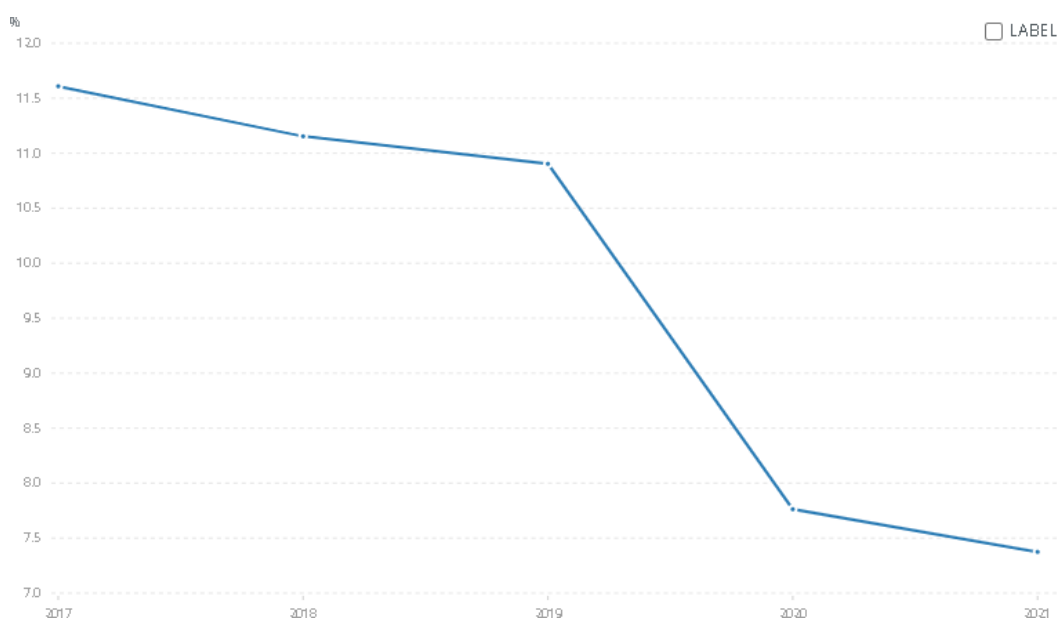
Dalam kampanye pemilihan presiden pada tahun 2019, Gotabaya Rajapaksa berjanji akan melakukan pemotongan pajak. Hal tersebut tentunya disambut oleh pandangan skeptis masyarakat Sri Lanka. Masyarakat menganggap bahwa hal ini hanya sebatas janji elektoral. Namun, pada November 2019 saat ia sudah menduduki kursi presiden, ia menepati janjinya dan mengumumkan pemotongan pajak tersebut yang disahkan pada rapat kabinet yang pertama (Schultz et al. 2022).

Pemotongan pajak tersebut meliputi penambahan nilai (PPN) hampir setengahnya menjadi 8% dari 15% dan menghapuskan *pay-as-you-earn* (PAYE), pembangunan bangsa (NBT), pemotongan pajak, pajak capital gain, dan pajak debit bank. Disebutkan oleh Gotabaya bahwa pemotongan pajak ini bertujuan untuk merangsang ekonomi.

Sebenarnya, pemotongan pajak dapat dibenarkan sebagai mekanisme dalam meningkatkan basis pajak. Namun tidak berhasil dilakukan di Sri Lanka, karena dalam praktiknya, Sri Lanka kehilangan lebih dari satu juta pembayar pajak sejak pemotongan pajak tersebut dilakukan. Pada tahun 2020, terdapat sebesar 1,56 Juta wajib pajak, dan pada tahun 2021, jumlah wajib pajak Sri Lanka menjadi 0,41 Juta. Tentunya hal ini merupakan suatu penurunan yang sangat drastis.

Hal ini didorong juga oleh kondisi pandemi pada tahun 2020 yang mengakibatkan meluasnya pengangguran. Kurva Laffer atau kurva yang menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan tingkat pendapatan pemerintah juga tidak terwujud karena pengumpulan pajak secara keseluruhan berkurang setelah pemotongan tarif pajak. Bahkan sebelum pemotongan pajak, Sri Lanka memiliki salah satu rasio pendapatan terhadap GDP terendah. Rasio pendapatan terhadap GDP Sri Lanka berada di 7,6% pada tahun 2021. Dengan berkurangnya pendapatan pemerintah, kemampuan pemerintah untuk membayar utang dalam mata uang asing melemah secara signifikan (Kataria, Manur, and Pradhan 2022, 4-6).

Gambar 4. Tax Revenue (% of GDP) Sri Lanka



Sumber : World Bank data (2021)

Karena terjadi penurunan GDP yang sangat drastis dan melemahnya kemampuan pemerintah dalam membayar utang, pemerintah Sri Lanka mengalami masa-masa keputusasaan.

Sebelumnya, *International Monetary Fund* (IMF) sudah menyarankan untuk menaikkan suku bunga dan mengurangi pengeluaran, daripada harus mencetak uang. Namun, pemerintah Sri Lanka tetap bersikeras untuk mencetak uang. Akhirnya pemerintah Sri Lanka memaksa bank sentral untuk mencetak uang sebesar 588 Miliar Rupee pada kuartal pertama 2022. Dan pada 6 April 2022, Bank Sentral mencetak jumlah tertinggi yang dicetak dalam sehari di tahun 2022, yakni sebesar 119,08 Miliar. Uang yang dicetak pada tahun 2022 ini termasuk ke dalam penjualan cadangan yang dilakukan untuk membayar utang, yang mana sebelumnya, Sri Lanka tidak pernah mencetak uang sebanyak ini (Economy Next 2022).

Hal ini dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka untuk membangun tekanan inflasi di pasar dan mempercepat agregat di pasar. Namun di sisi lain, pasokan barang dan jasa yang disediakan tidak berubah. Hingga terjadilah kenaikan harga yang sangat tajam. Juga disebutkan alasan lain di balik pencetakan uang dengan jumlah yang sangat besar ini untuk memulai ekonomi berbasis produksi di Sri Lanka. Selain itu, uang hasil cetakan digunakan untuk memenuhi keuangan pengeluaran negara dan menggaji pegawai negara (The Morning 2021).

Pemerintah Sri Lanka melakukan sebuah kesalahan, karena ketika uang dicetak dengan jumlah yang sangat besar, akan jauh lebih sulit untuk mengendalikan inflasi atau menstabilkan nilai tukar melalui penangguhan konvertibilitas, meskipun suku bunga lebih tinggi sekalipun.

Dalam kasus ini pun sebenarnya patut dipertanyakan, mengapa bank sentral dapat mencetak uang sebanyak itu dalam waktu yang sempit. Hal ini tentunya

merupakan tindakan yang tidak aman untuk Sri Lanka. Tindakan ini banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan.

3.1.3 Pematokan Nilai Tukar

Sebagai negara dengan jumlah impor yang besar, Sri Lanka mengurangi biaya impor dengan membatasi nilai tukar terhadap dolar, ditambah dengan persyaratan yang dianggap terlalu tinggi. Sri Lanka melakukan hal ini karena nilai tukar yang tinggi dinilai akan menghasilkan lebih banyak dolar per-rupee Sri Lanka. Hal ini tentunya sangat memungkinkan Sri Lanka untuk mengimpor lebih banyak barang dan jasa. Bank Sentral Sri Lanka mempertahankan nilai tukar dalam kisaran yang terbilang sempit, yakni sekitar LKR 200 per dollar. Walaupun hal ini dapat berhasil dalam waktu normal, ini adalah resiko yang dapat terurai dengan cara yang luar biasa.

Bank sentral mengelola pasak dengan mengumumkan kurs yang diinginkan dan menggunakan cadangan devisa untuk mempertahankan pasak tersebut. Biasanya, pengetahuan bahwa bank sentral bersedia mempertahankan patok membuat pedagang mengikuti patok tersebut. Ketika nilai tukar menyimpang dari patokan, katakanlah mulai terapresiasi atau terdepresiasi, bank sentral akan mengintervensi pasar untuk memulihkan nilai tukar dengan menjual dolar dan membeli mata uang atau sebaliknya.

Namun, pada saat krisis, ketika trader menduga cadangan devisa menipis, mereka akan mencoba untuk “mendobrak patokan” dengan menjual rupee dan membeli dolar. Pada titik ini, bank sentral menyerah dan membiarkan mata uang

terdepresiasi tajam atau kehilangan sejumlah besar cadangan devisanya dengan mencoba membiarkan mata uang terdepresiasi secara bertahap.

Secara bersamaan, karena kepercayaan terhadap ekonomi melemah, banyak orang mencoba memindahkan uang mereka ke luar negeri dan ke tempat yang lebih aman (biasanya, Amerika Serikat). Pelarian modal ini akan semakin melemahkan mata uang.

Dalam kasus Sri Lanka, Bank Sentral pada Maret 2022 pertama kali mendevaluasi mata uang (mungkin atas desakan IMF) dari kisaran 200-203 rupee per dolar menjadi sekitar 230/\$ (Jayasinghe 2022). Setelah devaluasi, pedagang mulai menjual rupee. Bank Sentral mencoba menghentikan pelarian modal dengan menggunakan sebagian dari cadangannya. Namun, ketika menyadari bahwa cadangan tidak cukup untuk mempertahankan nilai tukar, pasak tersebut pecah dan tiba-tiba terjadi depresiasi. Cukup jelas untuk melihat kapan pasak itu patah (lihat Gambar 1).

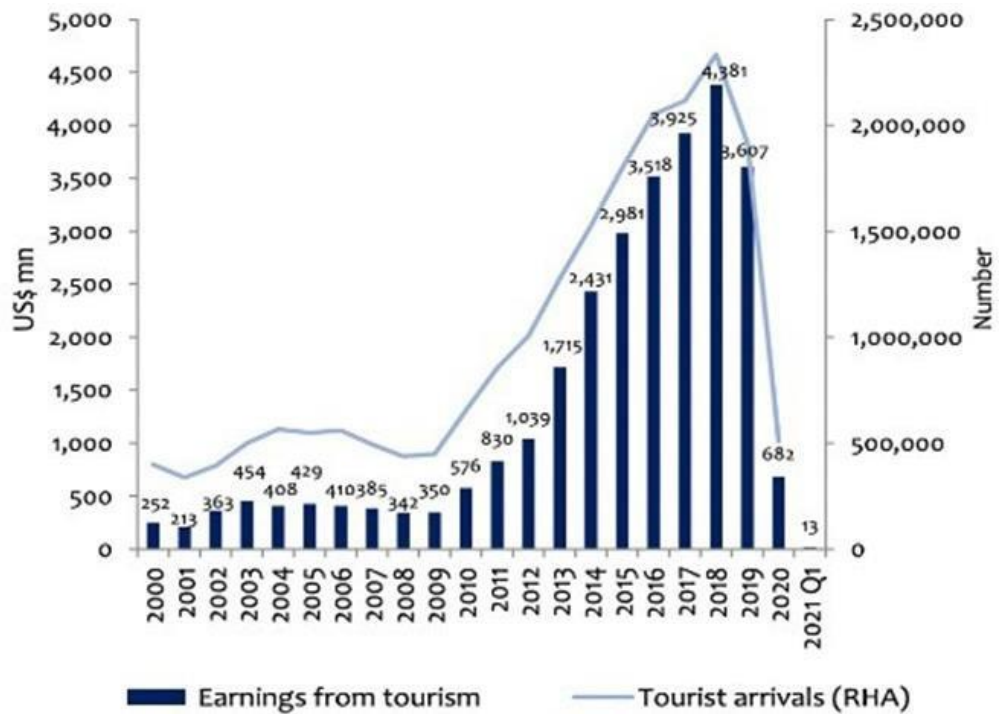
Sementara nilai tukar yang dipatok memungkinkan Sri Lanka mengimpor lebih banyak dengan jumlah rupee yang sama, Sri Lanka masih perlu membayar impor ini. Ekspor hanya akan membayar sebagian dari impor. Porsi yang lebih besar akan berasal dari pinjaman luar negeri.

3.1.4 Sektor Pariwisata Sri Lanka Merosot

Sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Sri Lanka. Bahkan, sektor pariwisata ini termasuk ke dalam dua sumber pekerjaan utama masyarakat sebesar 5,6%. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan angka dalam sektor pariwisata sebesar 6 persen dalam

pariwisata global dengan jumlah kedatangan 1,4 miliar wisatawan internasional dari mancanegara yang memberikan pendapatan sebesar US\$5,61 miliar kepada ekonomi Sri Lanka dan berkontribusi terhadap 5,6 persen dari GDP negara. Sektor pariwisata pada tahun 2018 ini tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari prediksi, yang mana diperkirakan angka 1,4 miliar baru akan tercapai pada tahun 2020 (Bhoumick 2022).

Gambar 5. Kedatangan Turis dan Penghasilan di Sri Lanka (2000-2021)



Sumber : *Observer Research Foundation*

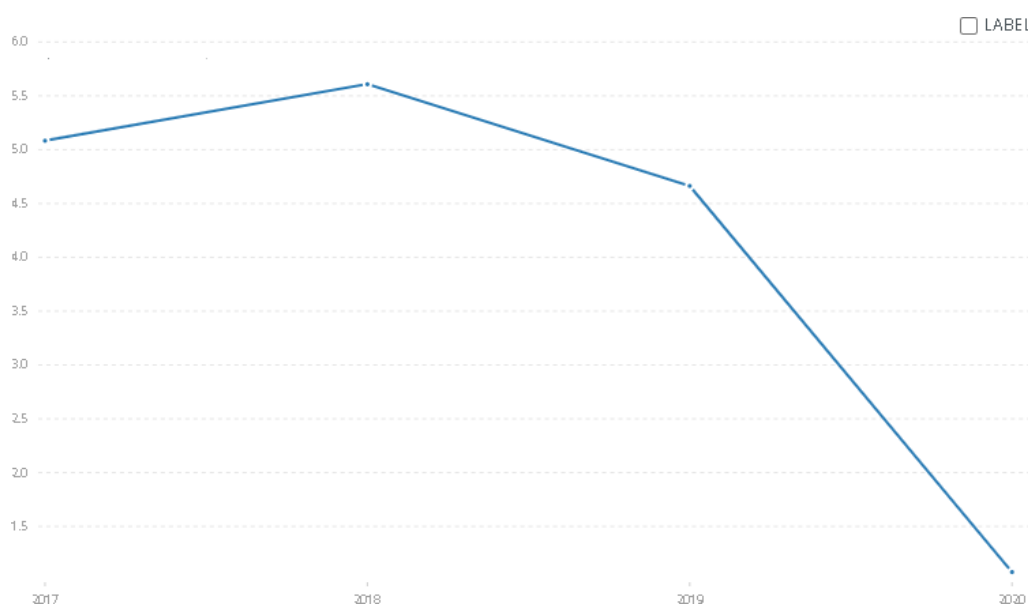
Bahkan, sektor pariwisata ini turut menghasilkan lapangan pekerjaan dalam industri perhotelan, transportasi, serta makanan dan minuman.. Pada tahun 2018, lapangan kerja di sektor ini menyumbang 3,8 persen dari total lapangan kerja dalam skala global. Sekitar lebih dari satu juta orang secara langsung menggantungkan

hidupnya pada pariwisata untuk penghidupannya (Aneja, Shridhar, and Mawii 2020).

Tahun setelahnya pada 2019, pariwisata menyumbang 10,4% terhadap GDP. Lalu turun menjadi 5,5% pada tahun 2020, yang mana pada tahun-tahun itu, pandemi COVID-19 melanda mancanegara. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi masuknya devisa ke dalam perekonomian.

Keuntungan pariwisata turun dari 5,61 miliar USD pada 2018 menjadi 4,66 miliar pada 2019 dan semakin drastis lagi pada tahun 2020, yakni hanya sebesar 1,08 miliar (Bank Dunia 2020).

Gambar 6. Pariwisata Internasional Sri Lanka (US\$ saat ini)



Sumber : World Bank data (2021)

Hal ini diperburuk juga oleh konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung pada tahun 2022. Rusia dan Ukraina merupakan negara yang memainkan peran penting dalam hal ini karena dua negara tersebut merupakan pasar wisata terbesar dan

ketiga terbesar. Dicatat terdapat sejumlah 20.000 turis dari Rusia dan Ukraina telah melakukan perjalanan ke Sri Lanka pada Januari 2022. Dan konflik yang terjadi mengancam akan membatasi arus pengunjung ke Sri Lanka ini (Bhoumick 2022).

Ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi di bawah kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa semakin menyebabkan penurunan angka wisatawan. Bahkan, sejumlah negara sudah mengeluarkan peringatan perjalanan yang melarang warganya untuk mengunjungi negara tersebut. Pada Mei 2022, Sri Lanka mencatat hanya 30.207 total kedatangan turis internasional, turun 72 persen dibandingkan Maret 2022.

3.1.5 Politik

Sistem politik Sri Lanka berawal dari kolonial Inggris pada tahun 1801. Sri Lanka memiliki sejarah panjang dalam bidang ini. Sri Lanka termasuk ke dalam negara multikulturalisme yang memiliki etnis yang berbeda-beda. Tiga perempat populasi adalah Sinhala, sedangkan seperempatnya terdiri dari Tamil Sri Lanka, Muslim, Tamil India, dan ras lainnya. Sebelumnya, pada tahun 1948, sempat terjadi ketegangan etnis, bahkan perang saudara antara Sinhala dan Tamil. Hal ini diawali ketika pada tahun 1956, Sinhala dinyatakan sebagai bahasa resmi. Hal inilah yang memicu Tamil merasa dalam posisi sekunder. Yang mana selama bertahun-tahun, bermunculan kebijakan-kebijakan dan keputusan hukum yang merugikan etnis Tamil. Akhirnya ketegangan mulai tumbuh dan memuncak ketika sebuah kelompok militan yang dikenal sebagai organisasi teroris bernama LTTE terbentuk.

Mereka telah menjadi bagian dari berbagai pembicaraan damai tanpa hasil yang bermanfaat dan telah terlibat konflik militer dengan Negara selama beberapa

dekade. LTTE dihentikan pada tahun 2009 melalui pembalasan tentara. Sementara konflik kekerasan berakhir, pembagian kekuasaan belum tercapai. Pemerintah Sri Lanka telah mengambil langkah-langkah untuk memusatkan kekuasaan di Pusat. Misalnya, institusi di tingkat nasional telah dibentuk untuk merebut kekuasaan provinsi. Selain itu, Presiden memiliki wewenang atas semua dewan provinsi di bawah Aturan Darurat. Darurat telah digunakan secara bebas oleh para pemimpin Sri Lanka. Ini hanyalah contoh lain dari otoritarianisme di Sri Lanka yang telah lazim sejak pemerintahan Jayewardene pada tahun 1979.

Namun, berlatar belakang keadaan sosial politik yang penuh dengan api, pada tahun 2009, ketika Rajapaksa memberantas pemberontak Tamil, ketegangan tersebut berakhir. Namun muncul masalah-masalah baru.

Pada pemerintahan Mahinda Rajapaksa, ia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan nepotisme atau dengan menawarkan sanak keluarganya untuk berada dalam kursi pemerintahannya. Selama kepemimpinannya, terdapat 20 lebih orang yang memiliki hubungan keluarga yang menempati posisi penting (Edirisuriya 2017). Ia juga dengan sewenang-wenang mengangkat 51 menteri dan 29 wakil menteri, yang berarti hampir semua anggota partainya, *United People's Freedom Alliance* mempunyai posisi pada kursi menteri ataupun wakil menteri.

Karena kesewenang-wenangannya itulah, dalam mengisi kursi pemerintahan di masa kepemimpinannya, banyak menteri kabinet dan non-kabinet serta anggota parlemennya yang dilaporkan melakukan korupsi, campur tangan politik yang tidak perlu, pelanggaran peraturan atau undang-undang, dan perilaku

buruk lainnya. Mahinda pun dalam menanggapi ini tidak tegas, hingga semakin banyak yang melakukan hal kotor tersebut.

Pemerintahan yang kotor dengan penyimpangan-penyimpangan ini tidak bisa hilang begitu saja, ketika pemerintahan bergeser pada era Gotabaya Rajapaksa, budaya kotor dalam pemerintahan ini masih terus berlangsung.

3.2 Perspektif *Failed States*

Kegagalan negara merupakan masalah yang banyak terjadi di negara-negara berkembang. Penyebabnya bukan hanya kinerja dan sistem ekonomi yang buruk, tetapi juga kegagalan dalam legitimasi dan kelayakan politik negaranya. Pemerintahnya kehilangan kepercayaan dari warga negaranya sendiri, dan secara tidak langsung, sifat negara tersebut menjadi tidak sah di mata dan hati pluralitas yang tumbuh dari warganya. Dan karena kepercayaan publik pada pemerintahnya hilang, klaim yang tidak berwujud dan sulit dihitung yang pernah dibuat oleh warga negara atas kedaulatan negara atau yang disebut *political goods* dalam negara tersebut tidak dapat terpenuhi. *Political goods* tersebut diantaranya seperti ekspektasi, kewajiban, informasi budaya politik lokal, dan bersama-sama memberikan isi kontrak sosial antara penguasa dan yang dikuasai. Hal tersebut merupakan inti dari interaksi rezim atau pemerintah dan warga negara.

Pada tahun 1998-2002 lalu, para pakar *Failed States* akhirnya mencoba untuk menganalisis fenomena kegagalan dan keruntuhan negara-bangsa yang marak pasca perang dingin silam. Dalam hal ini dikaji kasus-kasus kontemporer mengenai keruntuhan dan kegagalan negara-bangsa, dan muncullah *urgent questions* di abad ke-21 yang berusaha untuk dipecahkan, yakni mengenai cara

terbaik memperkuat negara lemah dan mencegah kegagalan negara dan lebih lanjut menganalisis sifat kelemahan negara dengan mengajukan alasan mengenai beberapa negara lemah yang menyerah pada kegagalan dan mengapa negara lain yang lebih lurus tetap lemah tanpa pernah merusak (Rotberg 2003).

Rotberg mengatakan dalam bukunya bahwa syarat negara menjadi negara gagal adalah (1) Telah kehilangan kendali atas wilayah perbatasan mereka; (2) Tidak dapat melindungi warganya dari kekerasan terorganisir; (3) Tidak dapat mencegah tumbuhnya kejahatan terorganisir; (4) Memiliki institusi yang lemah dan gagal; (5) Gagal menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial lainnya yang memadai; dan (6) Pemerintah kehilangan legitimasi di mata masyarakatnya. Yang kemudian dipersempit menjadi dua dimensi *state health* (kesehatan negara), yakni; (1) monopoli kekuatan yang sah atas wilayah negara; dan (2) penyediaan *public goods* untuk warga negara (Rotberg 2003).

Dalam kasus ini, dengan ke-enam aspek tersebut, kondisi Sri Lanka mencakup poin ke-empat hingga ke-enam, yakni memiliki institusi yang lemah dan gagal, gagal menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial lainnya yang memadai, dan yang terakhir, pemerintahnya kehilangan legitimasi di mata masyarakatnya. Dalam bab ini akan dibahas satu persatu mengenai poin-poin tersebut.

3.2.1 Institusi yang Lemah dan Gagal

Dimulai sejak kepemimpinan Mahinda Rajapaksa, dimana ia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan nepotisme atau dengan menawarkan sanak keluarganya untuk berada dalam kursi pemerintahannya. Selama

kepemimpinannya, terdapat 20 lebih orang yang memiliki hubungan keluarga yang menempati posisi penting (Edirisuriya 2017,). Ia juga dengan sewenang-wenang mengangkat 51 menteri dan 29 wakil menteri, yang berarti hampir semua anggota partainya, *United People's Freedom Alliance* mempunyai posisi pada kursimenteri ataupun wakil menteri.

Karena kesewenang-wenangannya itulah, dalam mengisi kursi pemerintahan di masa kepemimpinannya, banyak menteri kabinet dan non-kabinet serta anggota parlemennya yang dilaporkan melakukan korupsi, campur tangan politik yang tidak perlu, pelanggaran peraturan atau undang-undang, dan perilaku buruk lainnya. Mahinda pun dalam menanggapi ini tidak tegas, hingga semakin banyak yang melakukan hal kotor tersebut.

Pemerintahan yang kotor dengan penyimpangan-penyimpangan ini tidak bisa hilang begitu saja, ketika pemerintahan bergeser pada era Gotabaya Rajapaksa, budaya kotor dalam pemerintahan ini masih terus berlangsung.

3.2.2 Kegagalan Pemerintah memenuhi *Political Goods*

Dalam menjalankan pemerintahannya, Robert I. Rotberg mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dapat menyediakan serta dapat memenuhi *political goods* untuk warganya. *Political goods* yang dimaksud oleh Rotberg merupakan sebuah layanan bermanfaat yang harus diberikan kepada warga negara untuk menimbulkan rasa aman. Hal-hal tersebut dapat meliputi pertahanan negara, infrastruktur, pendidikan, keamanan negara ataupun keamanan manusia, kebebasan masyarakat, serta perlindungan terhadap segala bentuk ancaman.

Dalam hal ini pada kasus krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2022, pemerintah Sri Lanka sudah tidak dapat memenuhi *political goods* kepada warganya. Dilihat dari keadaan negaranya yang kacau akibat inflasi dan terjadi kebangkrutan di berbagai sektor. Banyak fasilitas publik yang intensitasnya terpaksa dikorbankan.

Dalam bidang transportasi umum, pemerintah mengurangi armadanya akibat krisis bahan bakar minyak. Harga-harga kebutuhan pokok pun melonjak drastis, yang mana hal ini tentunya sangat menyulitkan warga dengan ekonomi menengah kebawah untuk bertahan hidup. Banyak juga keluarga yang memberhentikan pendidikan anaknya karena alasan biaya. Pendidikan menjadi hal yang mewah. Weerasinghe mengatakan kehadiran siswa sempat turun sampai 40% sehingga ia terpaksa meminta para guru untuk membawa makanan tambahan supaya siswa terus kembali ke kelas (BBC News Indonesia 2023).

Rumah sakit juga mulai kehabisan persediaan penting dan obat-obatan. Hal ini tentunya sangat mengancam nyawa. Tenaga medis mengatakan bahwa krisis persediaan tersebut telah memaksa mereka untuk memilih-milih dalam menangani operasi yang dirasa lebih penting dan mengabaikan operasi yang lebih ringan. Adapun beberapa tenaga medis yang mengakali dengan penggunaan kembali beberapa alat dan juga menjatah beberapa peralatan (BBC News Indonesia 2022).

Selain itu juga, terjadi pemadaman listrik harian dengan waktu yang tak sebentar, yakni 10 jam di sejumlah wilayah. Hal ini terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar yang menjadikan pembangkit listrik tersendat. Diperparah juga dengan menipisnya stok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dalam hal ini, Sri Lanka tidak mampu mengimpor bahan bakar dan batu

bara karena tidak memiliki devisa yang cukup untuk membayar persediaan tersebut (CNN Indonesia 2022).

Hal ini tentunya sangat mengganggu mobilitas warga. Warga negara Sri Lanka tidak lagi merasa aman di bawah pimpinan pemerintahnya di tengah situasi yang sangat kacau ini. Segala kebutuhan pokok untuk dapat bertahan hidup sulit didapatkan dan kehidupan masyarakat Sri Lanka sangat jauh dari kata aman dan sejahtera.

3.2.3 Kegagalan Legitimasi Pemerintahan

Karena hal-hal yang terjadi di Sri Lanka seperti yang telah disebutkan diatas, tidak sedikit masyarakat Sri Lanka yang turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa. Kekacauan terjadi di berbagai kota, pengunjuk rasa menyerbu istana kepresidenan di ibu kota Sri Lanka, Kolombo. Mereka yang menyuarakan keresahannya juga tidak serta merta berhasil. Mereka terpaksa dibungkam menggunakan gas air mata yang berakhir bentrok antar warga sipil dan aparat kepolisian. Pihak berwenang Sri Lanka semakin menangani hal tersebut dengan cara kekerasan. Mereka menggunakan kekuatan berlebihan dan undang-undang darurat. Mereka mengerahkan kekuatan pada angkatan bersenjata. Bahkan dalam dua kesempatan, aparat menembakkan peluru tajam kepada pengunjuk rasa, hal ini menewaskan satu orang (Amnesty International, n.d.).

Situasi negara menjadi semakin tidak kondusif, masyarakat pengunjuk rasa semakin mendesak presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mengundurkan diri. Pengunjuk rasa mendobrak istana kepresidenan, dan pada akhirnya presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke Maldives pada 14 Juli 2022 dan akhirnya

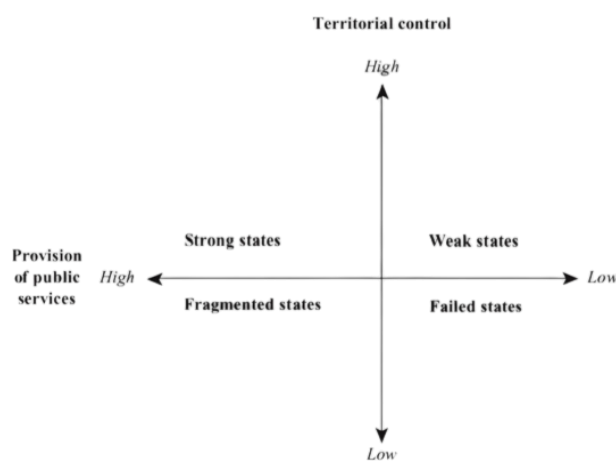
melarikan diri ke Singapura pada 15 Juli. Sesampainya di Singapura, Gotabaya lalu mengirimkan surel pengunduran diri dan menyerahkan pemerintahannya ke tangan perdana menteri Ranil Wickremesinghe (Jayasinghe, Pal, and Lin 2022).

Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat Sri Lanka terhadap pemerintahnya sudah hilang. Masyarakat Sri Lanka memberontak dan melawan pemerintahnya sendiri. Bahkan masyarakat Sri Lanka menyerukan pengunduran diri seorang pemimpin negaranya, yakni Gotabaya Rajapaksa. Dalam hal ini pemerintah Sri Lanka kehilangan legitimasinya karena dianggap tidak dapat memenuhi *political goods* masyarakat Sri Lanka.

3.2.4 Kategori Sri Lanka Melalui *Failed States Theory*

Sri Lanka pada tahun 2022 dengan situasi ekonomi dan politiknya yang kacau menyebabkan kegagalan legitimasi oleh pemerintahnya. Maka dari itu, dari dua indikator yang telah dipersempit, Sri Lanka dapat dikategorikan dalam keadaan *Weak States*.

Gambar 7. Indikator *State Health*



Sumber : Robert I. Rotberg

Seperti yang tergambar pada bagan di atas, Sri Lanka termasuk ke dalam *Weak States* karena dalam faktor-faktor yang sudah dibahas di atas disebutkan bahwa faktor penyebab Sri Lanka mengalami kegagalan legitimasi adalah krisis ekonomi, yang mana dalam hal ini, *Provision of Public Service*-nya tidak tercapai. Sri Lanka terguncang karena pemerintahnya tidak dapat memenuhi *political goods* yang seharusnya hal tersebut merupakan aspek yang penting untuk kesejahteraan sebuah negara. Dan apabila sebuah negara tersebut tidak dapat memenuhi *political goods* masyarakatnya, akan hilang kepercayaan publik terhadap pemerintahnya, sehingga pemerintah akan kehilangan legitimasi.

Sementara pada *Territorial Control*-nya, Sri Lanka masih memegang dengan kuat dan tidak terjadi pemberontakan dan perebutan wilayah. Sri Lanka masih bebas akan ancaman terhadap control atas wilayahnya. Maka dari itu, jika ditempatkan di bagan tersebut, Sri Lanka termasuk ke dalam *Weak States*.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Krisis ekonomi di Sri Lanka yang terjadi pada tahun 2022 merupakan akumulasi puncak dari segala kekacauan yang terjadi di Sri Lanka. Mulai dari kesalahan pemerintah Sri Lanka dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang lama dalam mengelola ekonomi negara, hingga menyebabkan krisis ekonomi, dimana kesejahteraan masyarakat Sri Lanka terganggu.

Selain sektor ekonomi, juga sampai kepada sistem politik Sri Lanka yang memiliki sejarah panjang akan perang saudara. Perang saudara antara Sinhala dan Tamil tersebut memang sudah terselesaikan, namun justru dalam keadaan yang sudah jauh lebih stabil, dibawah kepemimpinan keluarga Rajapaksa, banyak terjadi nepotisme dalam perekrutan kabinetnya. Hal ini menimbulkan masalah baru, sumber daya manusia yang memegang kursi pemerintahan menjadi tidak terkontrol kualitasnya, sehingga banyak terjadi kasus-kasus korupsi dalam kabinetnya yang secara tidak langsung sangat berpengaruh pada keberlangsungan negara.

Kasus-kasus nepotisme dan korupsi ini menyebar luas hingga nama Rajapaksa yang semula dipuja-puja menjadi tercoreng, dan siapa sangka bahwa masih banyak sekelompok orang yang tidak terima akan cara pemerintah terutama keluarga Rajapaksa dalam menanganinya. Keluarga Rajapaksa dianggap memberantas dengan brutal dan melanggar beberapa hak asasi manusia. Meskipun fakta ini pada akhirnya disangkal oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa. Namun di situasi negara yang sedang jauh dari kata kondusif ini, sekelompok orang-orang

tersebut memprovokasi, dan tidak sedikit pula yang mulai terpengaruh oleh provokasi-provokasi tersebut.

Hal-hal politik inilah yang memperkeruh kemarahan masyarakat Sri Lanka dan pada akhirnya muncul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah Sri Lanka. Hingga akhirnya terjadi unjuk rasa di sejumlah wilayah yang berlangsung anarkis. Dalam demonstrasi nya, masyarakat Sri Lanka mendesak kepala pemerintah, presiden Gotabaya Rajapaksa untuk turun dari kursi pemerintahan. hingga presiden Gotabaya Rajapaksa memilih untuk melarikan diri ke Singapura dan pada akhirnya mengirimkan surel berisi pengunduran diri sekaligus menyerahkan kekuasaan kepada perdana menteri Ranil Wickremesinghe.

Dari kacamata *Failed States Theory* oleh Robert I. Rotberg, dari empat klasifikasinya, yakni (1) *strong states*; (2) *fragmented states*; (3) *weak states*; dan (4) *failed states*, Sri Lanka belum termasuk ke dalam negara gagal atau *Failed States*. Melainkan termasuk ke dalam *Weak States*, atau negara lemah. Karena dalam dua dimensi yang telah dipersempit, yakni monopoli wilayah dan penyediaan *public goods*, Sri Lanka hanya terklasifikasi hanya dalam poin kedua, yakni gagal menyediakan *public goods*.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini terbatas pada bahasan terkait faktor-faktor penyebab kegagalan legitimasi pemerintahan yang terjadi pada tahun 2022 dan ditinjau dari kacamata *Failed States Theory* oleh Robert I. Rotberg. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan riset dengan topik yang sama, penulis

merekomendasikan untuk melihat bagaimana upaya Sri Lanka dalam membangun kembali negaranya yang pada tahun 2022 dalam kondisi diambang kegagalan dan termasuk ke dalam negara lemah. Peneliti selanjutnya juga dapat menganalisa kontinuitas legitimasi pemerintah Sri Lanka pada masa kepemimpinan presiden yang baru, yakni presiden Ranil Wickremesinghe.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. 2023. "India extends \$1bn credit line for Sri Lanka by a year." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/9/india-extends-1bn-credit-line-for-sri-lanka-by-a-year>.
- Amnesty International. n.d. "End the crackdown on peaceful protests in Sri Lanka." Amnesty International. Accessed 2023. <https://www.amnesty.org/en/petition/end-the-crackdown-on-peaceful-protests-in-sri-lanka/>.
- Aneez, Shihar, and Ranga Sirilal. 2019. "Sri Lanka ex-defence chief launches presidential campaign, pledges safer nation." Reuters. <https://www.reuters.com/article/uk-sri-lanka-politics-idUKKBN1WO2AS>.
- Aneja, Urvashi, Aishwarya Shridhar, and Zothan Mawii. 2020. "Platformization of the tourism sector in Sri Lanka: Impacts on labour market and decent work opportunities." ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_755007.pdf.
- Attanayake, Chulanee, and Roshni Kapur. 2018. "Mahinda Rajapaksa: An Influential Figure in Sri Lanka Politics." *ISAS Brief* 621 (November): 1-2.
- BBC. 2022. "Semua menteri di Sri Lanka mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi terparah." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60951830>.
- BBC News Indonesia. 2022. "Sri Lanka krisis utang, rumah sakit kehabisan obat dan terancam kolaps." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61137207>.
- BBC News Indonesia. 2023. "Bisa sekolah jadi hal mewah di Sri Lanka akibat krisis ekonomi." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-64161032>.

- Bhoumick, Soumya. 2022. "How tourism in Sri Lanka went downhill: Causes and consequences." Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/expert-speak/how-tourism-in-sri-lanka-went-downhill/>.
- CNN Indonesia. 2022. "Krisis Energi, Sri Lanka Mati Lampu 10 Jam per Hari." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220330130005-85-777899/krisis-energi-sri-lanka-mati-lampu-10-jam-per-hari>.
- Daily FT. 2020. "SL's descent to lower middle income: Strategise to move up to high-income level." Daily FT. <https://www.ft.lk/Columnists/SL-s-descent-to-lower-middle-income-Strategise-to-move-up-to-high-income-level/4-702627>.
- Daily Mirror. 2017. "Rajapaksa: The Sinhala Selfie A Different perspective of politics - News Features." Daily Mirror. <https://www.dailymirror.lk/article/Rajapaksa-The-Sinhala-Selfie-A-Different-perspective-of-politics-137753.html>.
- DeVotta, Neil. 2022. "Behind the crisis in Sri Lanka – how political and economic mismanagement combined to plunge nation into turmoil." The Conversation. <https://theconversation.com/behind-the-crisis-in-sri-lanka-how-political-and-economic-mismanagement-combined-to-plunge-nation-into-turmoil-187137>.
- Dr. Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*. N.p.: Oase Pustaka. Layanan Hukum UNS.
- The Economist Intelligence Unit. 2019. "Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and democracy."
- Economy Next. 2022. "Sri Lanka money printing in 2022 reaches Rs588bn in first quarter | EconomyNext." Economy Next. <https://economynext.com/sri-lanka-money-printing-in-2022-reaches-rs588bn-in-first-quarter-94262/>.
- Edirisuriya, Piyadasa. 2017. "The Rise and Grand Fall of Sri Lanka's Mahinda Rajapaksa The End of an Era?" *ASIAN SURVEY* 57:2.

- Ethirajan, Anbarasan. 2022. "Sri Lanka crisis: How war heroes became villains." BBC.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-61411532>.
- Federal Research Division Library of Congress. 1998. *Sri Lanka a Country Study*. Edited by Russel R. Ross and Andrea M. Savada. N.p.: United States Government as represented by the Secretary of the Army.
- Frontline. 2022. "Explained: Why Sri Lanka defaulted on its foreign debt." Frontline.
<https://frontline.thehindu.com/dispatches/explained-why-sri-lanka-defaulted-on-its-foreign-debt/article65396094.ece>.
- George, A.S. H., A. S. George, and T. Baskar. 2022. "Sri Lanka's Economic Crisis: A Brief Overview." *Partners Universal International Research Journal(PUIRJ)* 01, no. 02 (April): 1-11.
<https://www.puirj.com/index.php/research/article/view/19/12>.
- Hashim, Asad. 2019. "Gotabaya Rajapaksa wins Sri Lanka election | Elections News." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2019/11/17/gotabaya-rajapaksa-wins-sri-lanka-election>.
- He, Yan. 2020. "The Developmental Government and Economic Development in Sri Lanka 2005–2019: Lessons from East Asian Developmentalism." *Istanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi* 40 (June): 823-846.
- Hemachandra, W. M. 2011. "Financial Crises and Impacts of Recent Financial Crises on Sri Lanka." *Staff Studies* 41 (No. 1 dan 2): 1-40.
- The Hindu. 2023. "India says it will continue to support Sri Lanka in overcoming its financial crisis." The Hindu. <https://www.thehindu.com/news/national/india-says-it-will-continue-to-support-sri-lanka-in-overcoming-its-financial-crisis/article67059997.ece>.

The Indian Express. 2022. "Sri Lanka suffers long power cuts, lacks foreign currency to import fuel." The Indian Express. <https://indianexpress.com/article/world/sri-lanka-suffers-long-power-cuts-lacks-foreign-currency-import-fuel-7844855/>.

The Indian Express. 2022. "Explained: What led to Sri Lanka's economic crisis, and who's helping?" The Indian Express. <https://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/>.

Jamkhandikar, Shilpa, Devjyot Ghoshal, Uditha Jayasinghe, and Raju Gopalakrishnan. 2023. "Sri Lanka's economic crisis: From protests to IMF bailout." Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lankas-economic-crisis-protests-imf-bailout-2023-03-21/>.

Jayasinghe, Uditha. 2022. "Explainer: Sri Lanka on the edge as debt burden mounts." Reuters. <https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/sri-lanka-edge-debt-burden-mounts-2022-01-17/>.

Jayasinghe, Uditha, Alasdair Pal, and Chen Lin. 2022. "Sri Lankan president hands in resignation after fleeing to Singapore." Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-awaits-presidents-resignation-after-flight-2022-07-14/>.

Kataria, Aarushi, Anupam Manur, and Sarthak Pradhan. 2022. "Sri Lanka's Economic Crisis." *Takshashila Institution* 1 (August): 4-6.

Kemlu.go.id. n.d. "KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA , di Colombo,, SRI LANKA." KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA , di Colombo,, SRI LANKA. Accessed May 28, 2023. <https://kemlu.go.id/colombo/id/read/sri-lanka/1913/etc-menu>.

- Major, John. n.d. "Sri Lanka." Asia Society. <https://asiasociety.org/education/sri-lanka>.
- Matthias, Anne T., and Saroj Jayasinghe. 2022. "Worsening Economic Crisis in Sri Lanka: Impacts on Health." *The Lancet* 10 (July): e959.
- The Morning. 2021. "Money printing: More printing, more problems?" The Morning. <https://www.themorning.lk/articles/185637>.
- N, Sebastian. 2022. "The Island State in Unrest: Emergent Economic and Political Crisis in Sri Lanka." *NCC Review* CXLII No.4 (May): 6-16.
- OCBC NISP. 2023. "Krisis Ekonomi Sri Lanka, Apa Penyebab & Solusinya?" OCBC NISP. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/02/krisis-ekonomi-sri-lanka>.
- Rashid, Ahmed K., and Elayna Hamashuk. 2012. "Towards A Nuanced Understanding of Failed States." *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2012/03/06/towards-a-nuanced-understanding-of-failed-states/>.
- Rotberg, Robert I. 2003. *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. Edited by Robert I. Rotberg. N.p.: World Peace Foundation.
- Schultz, Kai, Suzi Ring, Emma Court, Naomi Kresge, and Angelica Peebles. 2022. "A Powerful Dynasty Bankrupted Sri Lanka in Just 30 Months." Bloomberg.com. <https://www.bloomberg.com/news/features/2022-04-27/the-powerful-rajapaksa-dynasty-bankrupted-sri-lanka-in-just-30-months>.
- Sen, Prarthana. 2022. "Concern for Sri Lankans fleeing to India amid economic crisis." Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/concern-sri-lankans-fleeing-india-amid-economic-crisis>.
- silva, Shavini d., Nimmi Jayathilake, and Padmashree Anandhan. 2022. "President Rajapaksa's resignation and the economic crisis in Sri Lanka, and the military's withdrawal in Sudan." *Conflict Weekly* 3 No. 15 (July): 2.

Srinivasan, Meera. 2019. "Gotabaya wins in presidential poll." The Hindu.

<https://www.thehindu.com/news/international/gotabaya-rajapaksa-wins-sri-lankan-presidential-election-official-results/article29998767.ece>.

World Bank. n.d. "Sri Lanka." World Bank Data. Accessed March 28, 2023.

<https://data.worldbank.org/country/LK>.